

**KESEJAHTERAAN WARTAWAN
UNTUK PENINGKATAN PROFESIONALISME
DAN INDEPENDENSI PADA AJI MAKASSAR**



Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Sosial Jurusan Jurnalistik
Pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar

Oleh

SYAHWAL RUSTAM
NIM : 50500110024

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
ALAUDDIN MAKASSAR**

2016

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syahwal Rustam

NIM : 50500110024

Tempat/Tgl. Lahir : Bulukumba 23 Agustus 1993

Jurusan : Jurnalistik

Fakultas/Program : Dakwah dan Komunikasi

Alamat : Jl. Tamangapa Raya V Antang

Judul :Kesejahteraan Wartawan Untuk Peningkatan
Profesioanlisme dan Independensi pada AJI Makassar

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika dikemudian hari terbukti merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata, 31 Maret 2016
Penyusun,

Syahwal Rustam
NIM: 50500110024

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Kesejahteraan Wartawan Untuk Peningkatan Profesionalisme dan Independensi Pada AJI Makassar", yang disusun oleh Syahwal Rustam, NIM: 50500110024, mahasiswa jurusan jurnalistik, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis 31 Maret 2016, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana social Jurusan Jurnalistik Fakultas Dakwah dan Komunikasi.

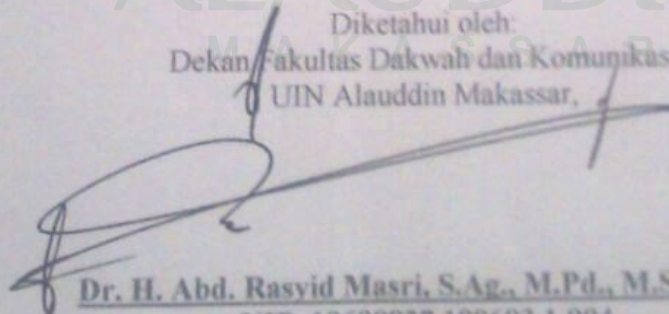
Gowa, 31 Maret 2016 M

DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. H. Mahmuddin, M.Ag
Sekretaris : Drs. Alamsyah, M.Hum
Munaqisy I : Muliadi S.Ag. M.Sos.i
Munaqisy II : Hartina Sanusi, S.Pt., M.Ikom
Pembimbing I : Dr. Firdaus Muhammad, M.Ag
Pembimbing II : Andi Fauziah Astrid, S.Sos, M.Si

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Alauddin Makassar,


Dr. H. Abd. Rasyid Masri, S.Ag., M.Pd., M.Si., M.M
NIP. 19690827 199603 1 004

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan berkah, rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Penulis diberikan kesempatan, kesehatan dan kemampuan untuk dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Salam dan shalawat atas junjungan Nabi Muhammad SAW., yang telah menuntun manusia ke jalan yang diridhoi oleh Allah SWT.

Skripsi yang berjudul **“Kesejahteraan Wartawan Untuk Peningkatan Profesioanalisme dan Independensi pada AJI Makassar”** ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada program studi Jurnalistik Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Dalam pembuatan skripsi ini, Penulis sadar masih banyak kekurangan di dalamnya. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan sumbangan saran dan kritikan semua pihak untuk menyempurnakan skripsi ini menjadi lebih baik. Baik itu dari bimbingan para dosen maupun rekan-rekan mahasiswa. Dalam penyusunan skripsi ini, Penulis mendapatkan banyak motivasi, baik secara moral maupun materil. Oleh karena itu, dengan tulus penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Selaku Rektor UIN Alauddin Makassar Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si.,
2. selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar Dr. H. Abd. Rasyid Masri, S.Ag., M.Pd., M.Si., M.M, Dan Wakil Dekan I., Wakil Dekan II, dan Wakil Dekan III yang telah memberi wadah buat penulis.

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Kesejahteraan Wartawan Untuk Peningkatan Profesionalisme dan Independensi Pada AJI Makassar", yang disusun oleh Syahwal Rustam, NIM: 50500110024, mahasiswa jurusan jurnalistik, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis 31 Maret 2016, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana social Jurusan Jurnalistik Fakultas Dakwah dan Komunikasi.

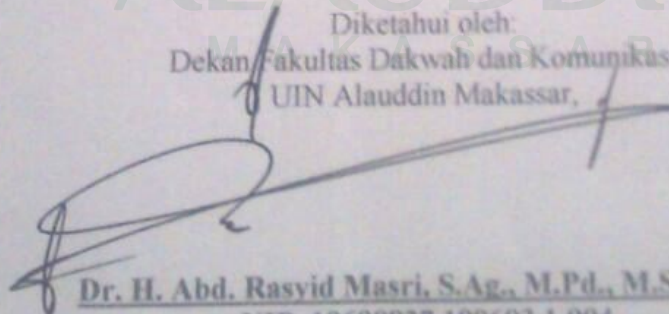
Gowa, 31 Maret 2016 M

DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. H. Mahmuddin, M.Ag
Sekretaris : Drs. Alamsyah, M.Hum
Munaqisy I : Muliadi S.Ag. M.Sos.i
Munaqisy II : Hartina Sanusi, S.Pt., M.Ikom
Pembimbing I : Dr. Firdaus Muhammad, M.Ag
Pembimbing II : Andi Fauziah Astrid, S.Sos, M.Si

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Alauddin Makassar,


Dr. H. Abd. Rasyid Masri, S.Ag., M.Pd., M.Si., M.M
NIP. 19690827 199603 1 004

3. selaku Ketua Jurusan Jurnalistik Muliadi, S.Ag., M.S.I dan Sekretaris Jurusan Jurnalistik UIN Alauddin Makassar Drs. Alamsyah, M.Hum., seluruh staf yang telah memberikan arahan dan petunjuk selama masa pendidikan.
4. selaku Pembimbing I Dr. Firdaus Muhammad M.Ag, yang senantiasa memberikan arahan pada saat penulis masih merampungkan skripsi. Dan selaku Pembimbing II Ibu A Fauziah Astrid S.Sos, M.Si, yang dengan sabar dan tidak bosan-bosannya membantu Penulis saat konsultasi.
5. selaku Penguji I Muliadi, S.Ag., M.S.I dan selaku Penguji II Ibu Hartina Sanusi, S.Pt.,M.Ikom yang telah mengoreksi untuk membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Segenap Dosen, Staf Jurusan, Tata Usaha dan Perpustakaan Fakultas Dakwah dan Komunikasi tak lupa Penulis haturkan banyak terima kasih atas ilmu, bimbingan, arahan, motivasi dan nasehatnya selama Penulis menempuh pendidikan di Jurusan Jurnalistik.
7. Andi Rahman, Firdaus, Fathuddin, Muh. Ikhsan, Muh Rifki, Junaidin, Nur Fitri dan teman-teman yang penulis tidak bisa sebutkan satu persatu yang telah memotifasi dan turut membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Keluarga besar Jurusan Jurnaslitik dan Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Jurnalistik sertra adik-adik yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam proses perkuliahan di Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
9. Keluarga besar Mahasiswa Pecinta Alam Sultan Alauddin Makassar (MAPALASTA) yang selama ini mengajarkan penulis untuk selalu survival dalam keadaan apapun.
10. Keluarga besar Komunitas Mahasiswa Kreatif Jurnalistik (KOMATITIK) untuk ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi peneliti.

11. Teman-teman KKN Reguler Angkatan Ke-49 di Desa Bontomate'ne Kec. Rilau Ale Kab. Bulukumba yang menjadi tempat berbagi kehidupan selama 2 bulan.
12. Dengan segenap jiwa dan ketulusan hati penyelesaian skripsi ini penulis persembahkan kepada Ayahanda, H. Rustam Massa dan Ibunda Hj. Jumriati Terima kasih atas kasih sayang, doa dan restunya yang senantiasa diberikan kepada Ananda serta bantuan moril dan material yang tidak ternilai harganya.

Akhir kata, besar harapan Penulis agar kiranya skripsi ini berguna bagi kita semua dan dapat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Gowa, 31 Maret 2016

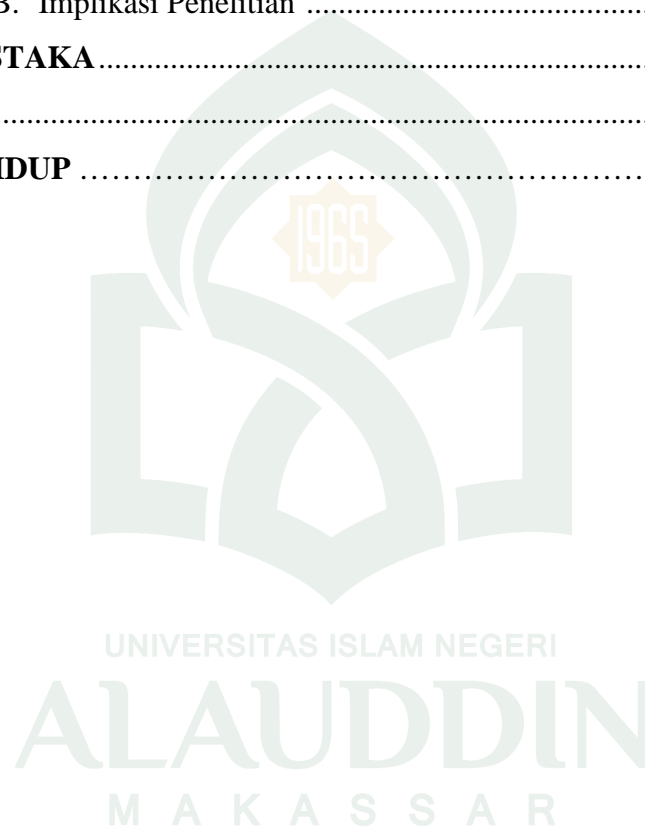
Penyusun

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R
Syahwal Rustam
Nim: 50500110024

DAFTAR ISI

	Page
HALAMAN SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABLE	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	6
D. Kajian Pustaka/Penelitian yang Relevan.....	6
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN TEORITIS	9
A. Komunikasi	9
B. Media Massa.....	11
C. Kesejahteraan	15
D. Wartawan.....	17
E. Profesionalisme	20
F. Independensi.....	23
G. Jurnalistik	29
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	32
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	32
B. Pendekatan Penelitian.....	32
C. Sumber Data	33
D. Metode Pengumpulan Data	33
E. Instrumen Penelitian	35
F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data	36

BAB IV HASIL PENELITIAN.....	37
A. Gambaran Umum AJI Makassar	37
B. Konsep Profesionalisme Wartawan AJI Makassar.....	43
C. Standar Upah Layak yang diterapkan AJI Makassar Terhadap Wartawan Dimakassar.....	51
BAB V PENUTUP.....	56
A. Kesimpulan.....	56
B. Implikasi Penelitian	57
DAFTAR PUSTAKA.....	59
LAMPIRAN.....	61
RIWAYAT HIDUP	66



DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1 Persamaan dan Perbedaan dengan Kajian terdahulu.....	7



DAFTAR LAMPIRAN

	Page
Lampiran 1	
Pedoman Wawancara dan Hasil Wawancara.....	
Lampiran 2	
Dokumentasi	



ABSTRAK

Nama : Syawal Rustam
Nim : 50500110024
Judul skripsi : Kesejahteraan Wartawan untuk peningkatan profesionalisme dan independensi pada AJI makassar

Pokok permasalahan dalam skripsi ini dikaji secara mendalam tentang Kesejahteraan Wartawan Untuk Peningkatan Profesionalisme dan Independensi pada AJI Makassar, dimana pokok permasalahan tersebut diformulasikan melalui pertanyaan penelitian, yakni: 1. Bagaimana Konsep Profesionalisme Wartawan Menurut AJI Makassar? 2. Bagaimana standar upah layak yang diterapkan AJI Makassar terhadap wartawan di Makassar ? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Konsep Profesionalisme Wartawan Menurut AJI Makassar. Selain itu dalam penelitian ini juga membahas mengenai standar upah layak yang diterapkan AJI Makassar terhadap wartawan di Makassar.

Penelitian dilakukan selama kurang lebih dua bulan, yaitu bulan Januari hingga Maret 2016. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif yang dianggap relevan dan berkenaan dengan pembahasan skripsi ini. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah kepustakaan dan penelitian lapangan yakni dengan melakukan observasi terlebih dahulu mengetahui gejala-gejala yang terjadi di lapangan serta dengan menggunakan teknik wawancara dimana penulis didalam mendapatkan data-data menggunakan buku pedoman UIN Alauddin Makassar untuk mengelolah data dan memperoleh informasi berupa fakta yang terangkai dalam pertanyaan yang diajukan kepada informan untuk dijawab.

Media massa sebagai sarana belajar untuk mengetahui berbagai informasi dan peristiwa. Ia ibarat “jendela” untuk melihat apa yang terjadi di luar kehidupan. Media massa adalah refleksi fakta, terlepas dari rasa suka atau tidak suka. Ia ibarat “cermin” peristiwa yang ada dan terjadi di masyarakat ataupun dunia. Media massa sebagai filter yang menyeleksi berbagai informasi dan isu yang layak mendapat perhatian atau tidak. Media massa sebagai penunjuk arah berbagai ketidakpastian atau alternatif yang beragam. Media massa sebagai sarana untuk mensosialisasikan berbagai informasi atau ide kepada public untuk memperoleh tanggapan/umpan balik. Media massa sebagai interkulator, tidak sekedar tempat “lalu lalang” informasi, tetapi memungkinkan terjadinya komunikasi yang interaktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya penekanan kemasing masing anggota AJI untuk tetap menerapkan sikap profesional dalam menjalankan kegiatan jurnalistik sedangkan independensi wartawan AJI dalam melaksanakan tugas tidak diwajibkan memihak baik dari sisi ekonomi, politik, dan kepentingan yang bersifat pribadi lainnya. Kemudian Upah layak yang diterapkan AJI yaitu mengikuti standar UMP dan dapat memenuhi kebutuhan sentral wartawan dikarenakan hampir semua wartawan memiliki jam kerja yang melebihi jam kantor biasanya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Media massa adalah alat dari jurnalisme yang digunakan dalam penyampaian pesan-pesan dari sumber kepada khalayak (penerima) dengan menggunakan alat-alat komunikasi mekanis seperti surat kabar, film, radio, TV.¹ Media massa adalah faktor lingkungan yang mengubah perilaku khalayak melalui proses pelaziman klasik, pelaziman operan atau proses imitasi (belajar sosial). Dua fungsi dari media massa adalah media massa memenuhi kebutuhan akan fantasi dan informasi²

Wartawan sebagai pekerja pers juga membutuhkan pendapatan untuk menopang hidupnya. Kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan.³

Kompensasi dapat berupa gaji, bonus, tunjangan, atau tambahan penghasilan. Gaji adalah suatu pembayaran tetap, sementara bonus didasarkan pada pencapaian tujuan-tujuan kinerja untuk suatu periode. Gaji, bonus, tunjangan, atau tambahan penghasilan mencakup tunjangan-tunjangan khusus bagi karyawan, seperti bepergian, keanggotaan dalam suatu klub kebugaran, asuransi jiwa, tunjangan kesehatan, tiket untuk hiburan, dan bayaran-bayaran tambahan lainnya oleh perusahaan.

¹ Hafied Cangara, *Pengantar Ilmu Komunikasi (edisi revisi)*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2008). h 134

²Jalaluddin Rakhmat,... *Metode Penelitian Komunikasi*.(Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2004) h 207

³Malayu Hasibuan *.Manajemen Sumber Daya Manusia*. (Jakarta: PT Bumi Aksara 2000) h 117

Terjaminnya independensi wartawan, secara tidak langsung berdampak pada independensinya dalam membuat sebuah pemberitaan. Independensi menurut KBBI edisi IV tahun 2008 adalah keadaan yang tidak bergantung kepada orang lain, keadaan tidak merdeka, tidak di bawah kekuasaan atau pengaruh negara lain. Bill Kovach dan Tom Rosenstiel menyebutkan ada sembilan elemen jurnalisme. Pada elemen keempat disebutkan, jurnalis harus tetap independen dari pihak yang mereka liput (Kovach).

Independensi merupakan hal tersulit untuk dipertahankan manakala seseorang berhadapan dengan pihak di mana kita memiliki kepentingan dan secara emosi menjadi bagian darinya. Masihkah independensi terjaga ketika harus berhadapan dengan keluarga, rekan, majikan atau lawan-lawan kita? Dengan orang yang sudah memberi uang dan kita anggap baik? Pandangan bisa menjadi bias kemudian tidak objektif lagi. Memberi simpati berlebihan. Terhadap lawan-lawan kita juga tidak objektif, namun menilainya dengan nada antipati. Menjadi netral bukanlah prinsip dasar jurnalisme. Imparsialitas juga bukan yang dimaksud dengan objektivitas. Prinsipnya, wartawan harus bersikap independen terhadap orang-orang yang mereka liput.

Kebebasan pers yang saat ini kita rasakan sayangnya tidak diiringi dengan profesionalisme perusahaan media terhadap para pekerjanya. Masih banyak wartawan yang diupah rendah, bahkan di antaranya dibayar di bawah standar Upah Minimum Regional (UMR). Tak heran, kondisi wartawan yang memprihatinkan ini pada akhirnya bekerja tidak profesional dan melanggar kode etik wartawan.

Standar penghasilan atau kompensasi yang relatif rendah tentu saja membuat wartawan Indonesia mengalami kesulitan menjalani kehidupan dan penghidupan

mereka, termasuk dalam melaksanakan profesinya. Sebagai wartawan, mereka pastilah terbiasa bersinggungan dengan banyak pihak dan banyak suasana. Penghasilan yang rendah sering kali membuat wartawan dalam posisi yang sulit untuk mampu mempertahankan kepatuhan terhadap Kode Etik Jurnalistik dan mempertahankan idealisme yang menggebu di dalam dada ketika mulai menjadi wartawan.

Pada titik inilah kompensasi dan pendapatan memberikan dampak sikap yang bervariasi pada diri wartawan. Misalnya saja dalam soal penerimaan suap amplop atau apa pun namanya, yang dilarang oleh Kode Etik Jurnalistik ditanggapi dengan sikap sehari-hari wartawan yang sangat berlainan.

Kesenjangan antara kemerdekaan pers dan kesejahteraan wartawan tentu berdampak pada profesionalitas dan independensi wartawan. Di sinilah bahaya mulai mengintip. Wartawan yang seharusnya menjalankan dan menjaga kemerdekaan pers, dalam skala yang tinggi, justru dapat merongrong pelaksanaan kemerdekaan pers itu sendiri.⁴

Sistem pengupahan yang rendah dalam perusahaan pers tanpa disadari menjadikan budaya amplop menjadi sebuah pembenaran. Banyak perusahaan pers sengaja memberikan gaji pas-pasan bahkan kurang, karena mengetahui wartawannya pasti bakal dapat tambahan penghasilan atau amplop. Si wartawan pun tidak perlu repot-repot memperjuangkan perbaikan gaji karena dia bisa mendapat tambahan dari amplop.

Salah satu prinsip utama kerja wartawan adalah independen dan tidak terikat sumber berita. Dengan menerima amplop dari sumber berita, wartawan tidak lagi bisa

⁴Wina Armada Sukardi. *Menakar Kesejahteraan Wartawan*. (Jakarta: DEWAN PERS 2009).

menjaga sikap independensinya. Hasil survei AJI pada tahun 2005 di 17 kota di Indonesia termasuk Makassar, menunjukkan 67,8% wartawan menilai pemberian narasumber berupa uang akan memengaruhi terhadap liputan mereka.

Tidak ada amplop tanpa pamrih. Implikasi kerja wartawan adalah kepercayaan konsumennya. Maka kepatuhan pada etika adalah prinsip yang tidak bisa ditawar, dengan alasan apa pun.⁵

Ketatnya persaingan bisnis media, menuntut wartawan harus bekerja lebih profesional, meski dengan kondisi kesejahteraan yang memprihatinkan. Tentu saja tuntutan itu muncul demi mendapatkan berita eksklusif yang berdaya jual tinggi. Tidak jarang seorang jurnalis harus menunggu berjam-jam untuk meminta konfirmasi narasumber. Mereka pun harus siap keluar tengah malam untuk meliput kejadian seperti pembunuhan, kebakaran dan aksi terorisme.

Wartawan tak akan pernah menjadi wartawan profesional jika tidak memiliki semangat untuk menjadi (seorang) profesional. Semangat profesional akan melahirkan kecintaan, militansi, dan solidaritas terhadap profesi. Tanpa hal-hal ini, wartawan akan terjebak untuk melakukan pekerjaan wartawan sebagai sebuah rutinitas yang menjenuhkan, melelahkan dan kering kerontang. Wartawan akan memperlakukan pekerjaan wartawan teknis semata, yang penting ada berita, yang penting penugasan sudah dilakukan, yang penting *deadline* terpenuhi. Wartawan model begini sebenarnya adalah robot, menjadikan karya-karya jurnalistiknya tanpa roh, tak punya kepribadian dan gampang menjadi alat kekuasaan dan uang.

⁵Atmakusumah dkk. *Menggugat Praktek Amplop Wartawan Indonesia*. (Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen 2003). h 15

Kesenjangan antara kemerdekaan pers dan kesejahteraan wartawan tentu berdampak pada profesionalitas dan independensi wartawan. Di sinilah bahaya mulai mengintip. Wartawan yang seharusnya menjalankan dan menjaga kemerdekaan pers, dalam skala yang tinggi, justru dapat merongrong pelaksanaan kemerdekaan pers itu sendiri.⁶

Berdasarkan pengamatan peneliti, wartawan yang termasuk anggota AJI cabang Makassar juga masih ada yang menerima ‘amplop’. Hal ini dimungkinkan karena gaji rata-rata wartawan di Kota Makassar sangat rendah. Apalagi berdasarkan pengalaman peneliti, sebagian besar narasumber khususnya yang berkantong tebal maupun institusi pada acara-acara seremonial, kerap memberikan ‘amplop’ kepada wartawan.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti merasa tertarik untuk menggambarkan kompensasi wartawan dan independensi dalam membuat pemberitaan terhadap wartawan anggota Aliansi Jurnalis Independen cabang Makassar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan realitas tersebut di atas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam kajian ini akan dianalisis secara teoritik ke dalam beberapa sub masalah berikut:

1. Bagaimana Konsep Profesionalisme Dan Independensi Wartawan Menurut AJI Makassar?
2. Bagaimana standar upah layak yang seharusnya diterapkan Media terhadap Wartawan di Makassar menurut AJI ?

⁶ Wina Armada Sukardi. *Menakar Kesejahteraan Wartawan*. h 12

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Untuk menghindari pembahasan secara universal dan keluar dari pokok masalah yang akan diteliti, maka peneliti memberikan pembatasan-pembatasan. Oleh karena itu, fokus penelitian ini adalah: Kesejahteraan Wartawan Untuk Peningkatan Profesionalisme dan Independensi pada AJI Makassar:

1. Kesejahteraan bagi jurnalis ialah merujuk setidaknya pada “benefit ekonomi” sebagai imbalan atas pekerjaannya, kesejahteraan jurnalis itu meliputi : gaji bulana, tunjangan, asuransi, dan aneka genetif lainnya.
2. Wartawan merupakan orang yang pekerjaannya mencari, mengumpulkan, memilih, mengedit dan menyajikanya kepada masyarakat luas melalui media massa baik cetak, elektronik maupun online.
3. Peningkatan merupakan gambaran perubahan dari keadaan atau sifat yang negatif berubah menjadi positif.
4. Profesionalisme adalah tingkah laku, kepakaran atau kualiti dari seseorang yang profesional. Jadi, mengenai wartawan profesional ialah ketika wartawan tergabung dalam organisasi pers (organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers) yang diakui Dewan Pers.
5. Independensi adalah keadaan bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain.

D. Kajian Pustaka /Penelitian Relevan

Penelitian ini mengidentifikasi beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini atau riset yang dilakukan oleh peneliti yaitu terdapat pada tabel di bawah

No.	Judul	Jenis Penelitian	Fokus Penelitian
1.	<p>Ririn Muthia Rislaesa</p> <p>“Pemahaman profesionalisme dalam wartawan (studi pada Wartawan di banten)”</p> <p>Konsentrasi Jurnalistik Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Agteng Tirtayasa 2012</p>	<ul style="list-style-type: none"> Jenis penelitian kualitatif. 	<ul style="list-style-type: none"> Penelitian ini terfokus kepada profesionalisme pada wartawan
2	<p>M DIAZ BONNY S</p> <p>“Nilai-nilai strategis perjuangan aliansi jurnalis independen dalam kasus pembunuhan wartawan bagi kebebasan pers di Indonesia”</p> <p>Jurusan Ilmu Jurnalistik, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran, Jatinangor 2013</p>	<ul style="list-style-type: none"> Jenis penelitian kualitatif. 	<ul style="list-style-type: none"> Penelitian ini fokus ke pembunuhan wartawanya
3	<p>Syahwal Rustam</p> <p>“Kesejahteraan Wartawan Untuk Peningkatan Profesionalisme dan Independensi pada AJI Makassar”</p> <p>Jurusan Ilmu Jurnalistik, Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2016</p>	<ul style="list-style-type: none"> Jenis penelitian kualitatif. 	<ul style="list-style-type: none"> Penelitian ini fokus ke Kesejahteraan Wartawan AJI

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan oleh calon peneliti adalah:

- a. Untuk mengetahui Konsep Profesionalisme Dan Independensi Wartawan Menurut AJI Makassar.
- b. Untuk mengetahui standar upah layak yang seharusnya diterapkan media terhadap Wartawan di Makassar menurut AJI.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat atau berguna baik secara akademis maupun praktis.

a. Secara Teoritis

- 1) Peneliti ini diharapkan berguna dan memberikan sumbangan bagi pengembangan tentang ilmu kejournalistikan.
- 2) Menyumbangkan bahan kepustakaan dengan harapan dapat mejadi koleksi tulisan ilmiah yang bermanfaat.

b. Secara Praktis

Dari segi praktis yaitu sebagai salah satu panduan praktis bagi mahasiswa maupun instansi umum dalam mengembangkan sumber daya manusia (SDM) sehingga dapat menghasilkan jurnalis-jurnalis yang profesional dalam semua bidang.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Komunikasi

Komunikasi adalah hal yang paling wajar dalam pola tindakan manusia, tetapi juga paling komplis dan rumit. Bagaimana tidak, komunikasi sudah berlangsung semenjak manusia lahir, dilakukan secara wajar dan leluasa seperti halnya bernafas. Namun ketika harus membujuk, membuat tulisan, mengemukakan pikiran dan menginginkan orang lain bertindak sesuai dengan harapan kita, barulah disadari bahwa komunikasi adalah sebuah disiplin ilmu yang harus dipelajari.

Komunikasi adalah penyampaian informasi atau adanya saling pengertian dari seseorang kepada orang lain. Bagaimana pun komunikasi dipandang penting dalam kehidupan kita, baik sebagai individu maupun sebagai anggota keluarga, organisasi dan sebagai anggota masyarakat.⁷

Komunikasi merupakan sebuah “proses” dalam mewujudkan persamaan di antara orang yang melakukan hubungan. Kemudian sebagai sebuah disiplin umum, maka ilmu komunikasi mempelajari dan meneliti tentang perubahan sikap dan pendapat yang diakibatkan oleh informasi yang disampaikan oleh seseorang kepada orang lain.

komunikasi mempunyai dua fungsi umum. Pertama, untuk kelangsungan hidup diri sendiri yang meliputi: keselamatan fisik, meningkatkan kesadaran pribadi, menampilkan diri kita sendiri kepada orang lain dan mencapai ambisi pribadi. Kedua,

⁷Amir Purba dkk . *Pengantar Ilmu Komunikasi*. (Medan: PUSTAKA BANGSA PRESS. 2006) h 34

untuk kelangsungan hidup masyarakat, tepatnya untuk memperbaiki hubungan sosial dan mengembangkan keberadaan suatu masyarakat.⁸

Jurnalisme berarti pekerjaan mengumpulkan, menulis, mengedit, dan menerbitkan berita. Tujuan utama jurnalisme adalah menyediakan informasi yang dibutuhkan warga agar mereka bisa hidup bebas dan mengatur diri sendiri. Media membantu kita mendefinisikan komunitas kita, menciptakan bahasa yang dipakai bersama dan pengetahuan yang dipakai bersama. Pengetahuan yang berakar pada realitas. Jurnalisme juga membantu mengenali tujuan komunitas, para pahlawan dan para penjahat.

Dengan pengaruhnya yang besar dan langsung terhadap opini publik, jurnalisme tidak bisa dipandu hanya oleh kekuatan ekonomi, keuntungan dan kepentingan khusus. Sebaliknya jurnalisme harus dihayati sebagai misi yang dalam batas tertentu dianggap suci, bertindak-tanduk dengan pemahaman bahwa cara berkomunikasi yang kuat telah dipercayakan kepada Anda demi kebaikan semua.”

Allah berfirman Al-Qur'an: سورة التوبة . ١٠٥

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسِيرَیَ اللَّهِ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

⁸ (Mulyana, 2005:5). Mulyana, Deddy.. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2002.

Terjemahan :

Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan".

Surat At Taubah 105 menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kita untuk bekerja, dan Allah pasti membalas semua apa yang telah kita kerjakan. Yang paling unik dalam ayat ini adalah penegasan Allah bahwa motivasi atau niat bekerja itu mestilah benar. Sebab kalau motivasi bekerja tidak benar, Allah akan membalas dengan cara memberi azab. Sebaliknya, kalau motivasi itu benar, maka Allah akan membalas pekerjaan itu dengan balasan yang lebih baik dari apa yang kita kerjakan

Beramal artinya beraktifitas dalam dan demi hidup dan kehidupan. Karena dalam Islam tidak dikenal pemisahan antara dunia – akhirat, agama – dunia, maka segala aktifitas hidup dan kehidupan merupakan amal yang diperintahkan oleh Islam. Segala bentuk pekerjaan atau perbuatan bagi seorang muslim dilakukan dengan sadar dan dengan tujuan yang jelas yaitu sebagai bentuk pengabdian kepada Allah SWT.

B. Media Massa

Media massa adalah alat atau sarana yang digunakan dalam penyampaian pesan dari sumber (komunikator) kepada khalayak (komunikan/penerima) dengan menggunakan alat-alat komunikasi mekanis, seperti surat kabar, radio, televisi, film, dan internet.⁹

⁹Indah Suryawanti. *Jurnalistik Suatu Pengantar Teori dan praltik*. h 37

McQuaill dalam bukunya *Mass Communication Theories* menyatakan ada enam perspektif tentang peran media massa dalam konteks masyarakat modern, yaitu sebagai berikut.

1. Media massa sebagai sarana belajar untuk mengetahui berbagai informasi dan peristiwa. Ia ibarat “jendela” untuk melihat apa yang terjadi di luar kehidupan.
2. Media massa adalah refleksi fakta, terlepas dari rasa suka atau tidak suka. Ia ibarat “cermin” peristiwa yang ada dan terjadi di masyarakat ataupun dunia.
3. Media massa sebagai filter yang menyeleksi berbagai informasi dan isu yang layak mendapat perhatian atau tidak.
4. Media massa sebagai penunjuk arah berbagai ketidakpastian atau alternatif yang beragam.
5. Media massa sebagai sarana untuk mensosialisasikan berbagai informasi atau ide kepada public untuk memperoleh tanggapan/umpan balik.
6. Media massa sebagai interkulator, tidak sekedar tempat “lalu lalang” informasi, tetapi memungkinkan terjadinya komunikasi yang interaktif.¹⁰

Menurut F. Bond ada empat fungsi jurnalistik, yaitu sebagai berikut :

1. *To Inform* (untuk menginformasikan)
Jurnalistik merupakan sarana untuk menginformasikan fakta dan peristiwa yang terjadi di sekitar kehidupan manusia yang patut diketahui oleh publik.
2. *To Interpret* (Untuk menginterpretasikan)

¹⁰ Indah Suryawanti. *Jurnalistik Suatu Pengantar Teori dan praltik*. h. 37

Jurnalistik merupakan sarana untuk memberikan tafsiran atau interpretasi terhadap fakta dan peristiwa yang terjadi, sehingga publik dapat memahami dampak dan konsekuensi dari berita yang disajikan.

3. *To guide* (untuk mengarahkan)

Jurnalistik merupakan acuan untuk mengarahkan atau memberi petunjuk dalam menyikapi suatu fakta dan peristiwa yang disajikan dalam berita sehingga dapat menjadi pedoman bagi public dalam memberi komentar, pendapat, opini atau dalam mengambil keputusan.

4. *To entertain* (untuk menghibur)

Jurnalistik merupakan sarana untuk menghibur, menyegarkan, dan menyenangkan pembaca dengan menyajikan berita atau informasi yang ringan dan rileks sesuai dengan kebutuhan gaya hidup manusia.¹¹

Sementara Onong Uchjana Effendy menjabarkan fungsi yang melekat pada jurnalistik sebagai berikut :

1. Fungsi menyiarkan informasi (*to inform*)

Ini merupakan fungsi jurnalistik yang pertama dan paling utama. Khalayak pembaca berlangganan atau membeli surat kabar karena memerlukan informasi mengenai berbagai hal di bumi ini, mengenai kejadian atau peristiwa yang terjadi, gagasan atau pikiran orang lain, apa yang dikatakan orang lain dan sebagainya.

2. Fungsi mendidik (*to educate*)

Fungsi jurnalistik sebagai sarana pendidikan massa (*mass education*) media cetak (misalnya, surat kabar, majalah, dan tabloid) memuat tulisan tulisan

¹¹Indah Suryawanti..*Jurnalistik Suatu Pengantar Teori dan praltik* h. 38

yang mengandung pengetahuan. Begitu pula dengan media elektroni yang menayangkan program acara yang mendidik, sehingga khalayak bertambah pengetahuannya. menyangkut fungsi mendidik pada media cetak, bisa dalam bentuk artikel atau tajuk rencana secara implicit, atau cerita bersambung atau berita bergambar yang mengandung unsure pendidikan.

3. Fungsi menghibur (*to entertain*)

Hal-hal yang bersifat hiburan sering dimuat oleh surat kabar dan majalah untuk mengimbangi berita-berita berat (*hard news*) dan artikel yang berbobot. Isi media cetak (surat kabar, majalah, dan tabloid) yang bersifat menghibur bisa berbentuk cerita pendek, cerita bersambung, cerita bergambar, teka-teki silang pojok, karikatur. Tidak jarang juga, berita yang mengandung minat insane (*human interest*), dan kadang-kadang tajuk rencana sedangkan isi media elektronik yang sifatnya menghibur bisa dalam bentuk tayangan lawak atau komedi, kuis, sinetron, penayangan film, musik, dan masih banyak lagi. meski pemuatan atau penayangan isi mengandung hiburan, itu semata-mata untuk melemaskan ketegangan pikiran setelah para pembaca dihadirkan berita dan artikel yang berat.

4. Fungsi mempengaruhi (*to influence*)

Fungsi inilah yang menyebabkan pers memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Jurnalistik merupakan sarana untuk mempengaruhi pendapat dan pikiran orang lain tentang fakta dan peristiwa yang sedang menjadi topik pembicaraan. Sehubungan dengan itu, Napoleon pada masa jayanya pernah berkata bahwa ia lebih takut kepada empat surat kabar dari pada seribu serdadu dengan senapan bersangkur. Sudah tentu surat kabar yang

ditakuti adalah ini ialah surat kabar yang *independent*, yang bebas menyatakan pendapatnya, bebas melakukan kontrol sosial, bukan surat kabar yang membawakan “*his master voice*” fungsi memengaruhi dari surat kabar, secara implisit, terdapat pada tajuk rencana dan artikel¹².

C. Kesejahteraan

Kesejahteraan adalah kondisi manusia dimana orang-orangnya dalam keadaan makmur dan damai dalam artian menuju keadaan yang lebih baik. Idealnya balasan terhadap suatu jasa diberikan secara setimpal, bukan lebih sedikit dari jasa yang telah diberikan.¹³

Allah Mengisyaratkan bahwa Dia pun berbuat seperti itu. Artinya setiap perbuatan, usaha, dan prestasi itu berbanding dengan imbalan, pahala dan penghargaan yang akan diberikan.

Badan Pusat Statistik (BPS) secara rutin melakukan survei ketenagakerjaan (Sakernas). Lewat Sakernas ini ada informasi terperinci mengenai gaji dan klasifikasi usaha. Data Sakernas tahun 2003 menunjukkan, rata-rata gaji pekerja profesional di Indonesia adalah Rp 1,1 juta per bulan. Sementara survei AJI tahun 2006, menunjukkan 34% wartawan yang bergaji di bawah Rp 1 juta per bulan. Ini berarti banyak wartawan digaji di bawah rata-rata gaji tenaga profesional pada umumnya di Indonesia.¹⁴

¹² Indah Suryawanti. *Jurnalistik Suatu Pengantar Teori dan praltik* h. 39

¹³ Arep dkk., *Manajemen Sumber Daya Manusia*. (Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti 2003) h 197

¹⁴ Eriyanto. *Potret Jurnalis Indonesia*. Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen. 2006.) h 19

AJI adalah salah satu organisasi profesi wartawan. AJI lahir sebagai perlawanan komunitas pers Indonesia terhadap kesewenang-wenangan rezim Orde Baru. Mulanya adalah pemberedelan Detik, Editor dan Tempo, 21 Juni 1994. Ketiganya diberedel karena pemberitaannya yang tergolong kritis kepada penguasa. Tindakan represif inilah yang memicu aksi solidaritas sekaligus perlawanan dari banyak kalangan secara merata di sejumlah kota.

Gerakan perlawanan terus mengkristal. Akhirnya, sekitar 100 orang yang terdiri dari jurnalis dan kolumnis berkumpul di Sirnagalih, Bogor, 7 Agustus 1994. Pada hari itulah mereka menandatangani Deklarasi Sirnagalih. Inti deklarasi ini adalah menuntut dipenuhinya hak publik atas informasi, menentang pengekan pers, menolak wadah tunggal untuk jurnalis, serta mengumumkan berdirinya AJI.

Januari 2011 lalu, AJI meluncurkan upah layak jurnalis 2011 secara serentak di 16 kota cabang AJI: Jakarta, Surabaya, Kediri, Semarang, Yogyakarta, Bandar Lampung, Pontianak, Batam, Pekanbaru, Makassar, Kendari, Palu, Denpasar, Kupang, dan Jayapura. AJI mengampanyekan “Bebas Amplop”.

Peluncuran upah layak jurnalis secara serentak ini menjadi bagian dari kampanye perjuangan AJI dalam meningkatkan profesionalitas jurnalis yang kerap terbentur dengan kesejahteraan yang tidak layak. Di kota-kota tersebut, mulai Desember 2010 hingga pertengahan Januari 2011, AJI menyurvei standar upah layak jurnalis berdasarkan komponen dan harga kebutuhan hidup layak, dengan mengukur perubahan biaya hidup (*living cost*) seiring kenaikan harga barang di pasaran yang sesuai dengan kebutuhan seorang jurnalis. AJI menolak menggunakan standar Upah

Minimum Kota (UMK) yang masih kerap digunakan perusahaan media sebagai patokan untuk menggaji jurnalisnya.

”Upah yang rendah bisa membuat jurnalis terjebak menjadi pragmatis, tidak independen dan rentan terhadap suap,” kata Nezar Patria, Ketua Umum AJI Indonesia (www.ajiindonesia.org). Salah satu visi misi AJI adalah memperjuangkan kesejahteraan jurnalis. Hasil survei di Kota Makassar pada tahun 2010 menunjukkan upah layak yang mestinya diberikan kepada jurnalis muda yang baru diangkat menjadi karyawan tetap adalah Rp 3.816.120. Berbanding terbalik dengan tuntutan upah layak, survei AJI di berbagai kota tersebut masih menemukan fakta yang sangat memprihatinkan. Ditemukan, masih ada media yang menggaji jurnalisnya di bawah angka UMK. Di Makassar, Sumatera Utara, jurnalis radio City FM dan Star News, juga hanya memperoleh upah Rp 500 ribu-Rp 700 ribu, bahkan ada yang diupah berdasarkan hitungan berita.

D. Wartawan

Wartawan menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 1999 tentang pers, termuat dalam pasal 4 menyatakan, wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.

Mantan Jaksa Agung, Ali Said menganggap wartawan adalah wakil rakyat tanpa pemilu, sebab pekerjaannya selalu menulis untuk kepentingan rakyat. Kekuasaannya lebih tinggi dari penguasa. Wartawan sering sekali mendapat predikat pendidik informal dan menghibur, sebutan lebih kompleks dari guru dan jenderal¹⁵.

¹⁵Kusumaningrat, Hikmat dan Purnama Kusumaningrat. *Jurnalistik Teori dan Praktik*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2008) h 88

wartawan adalah seseorang yang bekerja dan mendapatkan nafkah sepenuhnya dari media massa berita.¹⁶

Mengingat beratnya tugas wartawan sehingga ia harus memiliki kriteria-kriteria. Wartawan sebuah profesi yang terbuka bagi siapa saja, pria dan wanita dengan latar belakang pendidikan apa saja. Ada beberapa kriteria wartawan yang baik, antara lain; punya rasa ingin tahu yang besar, berkepribadian, kuat fisik dan mental, punya integritas, berdaya cium berita tinggi, jujur dapat dipercaya, berani, tabah dan tahan uji, cermat, cepat, punya daya imajinasi tinggi, gembira, optimisme, punya rasa humor, punya inisiatif, dan kemampuan menyesuaikan diri. Wartawan adalah suatu profesi yang penuh tanggung jawab dan memiliki resiko yang cukup besar. Untuk profesi semacam ini diperlukan manusia-manusia yang memiliki idealisme dan ketangguhan hati yang kuat untuk menghadapi berbagai kendala, hambatan dan tantangan dalam menjalankan profesinya.¹⁷

Dibutuhkan suatu komitmen yang khusus menangani perlindungan terhadap profesi kewartawanan yang bekerja secara profesional dan memiliki moralitas, sehingga mampu melakukan pemantauan terhadap pekerjaan wartawan. Profesi wartawan harus dilindungi karena sangat terkait dengan upaya demokratisasi dan reformasi. Perlindungan terhadap wartawan juga harus diberikan tatkala muncul tekanan-tekanan ekonomis dan tekanan dari kelompok tertentu.¹⁸ Setiap wartawan harus menaati Kode Etik Jurnalistik¹⁹, antara lain:

¹⁶ Dja'far Assegaf. *Jurnalistik Masa Kini*. (Jakarta: Ghalia Indonesia 1991) h 142

¹⁷ Kurniawan Junaedhi. *Ensiklopedia Pers Indonesia*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 1991) h 272

¹⁸ Dja'far Assegaf. *Jurnalistik Masa Kini* h 142

¹⁹ Atmakusumah dkk. 2003. *Menggugat Praktek Amplop Wartawan Indonesia*. (Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen 2003) h 7

1. Memperhatikan persyaratan jurnalistik, seperti objektivitas, keadilan, keberimbangan dan ketidakbiasaan.
2. Cermat dalam hal akurasi bagi penyampaian fakta-fakta laporannya.
3. Menghargai kehidupan pribadi, sepanjang tidak mengganggu atau merugikan kepentingan umum.
4. Tidak berprasangka atau diskriminatif terhadap perbedaan SARA atau gender.
5. Tidak melecehkan/merendahkan martabat orang-orang yang kurang beruntung.
6. Menghormati hak-hak asasi manusia, termasuk kebebasan masyarakat untuk berekspresi dan memperoleh informasi.
7. Tidak terbujuk oleh iming-iming narasumber yang mengakibatkan sajian berita tidak objektif/profesional.

Selain itu terdapat beberapa kode etik yang jelas-jelas melarang wartawan menerima pemberian narasumber, yaitu dalam:

1. Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) Pasal 5; “Wartawan Indonesia tidak menerima suap dan tidak menyalahgunakan profesi”.
2. Kode etik Aliansi Jurnalisme Independen (AJI) pasal 13; “Jurnalis dilarang menerima sogokan”.
3. Kode etik Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pasal 4; “Wartawan Indonesia menolak imbalan yang dapat mempengaruhi objektivitas”.

Pada dasarnya wartawan selalu identik dengan pergaulan yang luas. Ada anggapan bahwa profesi sebagai wartawan adalah profesi 'basah' karena banyak disegani berbagai kalangan, bahkan berprofesi sebagai wartawan adalah satu-satunya profesi yang kebal hukum. Berbagai kritik tajam tertuju pada wartawan dan semakin mengukuhkan masyarakat bahwa dunia wartawan selalu lekat dengan dunia amplop.

E. Profesionalisme

Profe (*Profesionalisme*) penghargaan atas karya etika profesi berarti suatu cabang ilmu yang secara sistematis merefleksikan moral yang melekat pada suatu pofesi. Etika profesi juga dipahami sebagai nilai-nilai dan asas moral yang melekat pada pelaksanaan fungsi professionalsime tertentu dan wajib dilaksanakan oleh pemegang profesi itu.²⁰ DI Indonesia wartawan adalah sebuah profesi dan menjadi wartawan adalah pilihan professional. Bagaimana wartawan mendefinisikan pekerjaannya akan mempengaruhi isi media yang ia produksi.

Mereka yang ahli dalam sebuah profesi disebut (kaum) professional. Seseorang profesioanl dihargai karena karyanya, bukan karena hal-hal lain. Seorang wartawan dikenal dan dihargai masyarakat karna karya jurnalistiknya, seorang wartawan bukan terkenal karena dia pimpinan di sebuah surat kabar, bukan karena pintar melobi, cari muka, atau pintar berpidato. Seorang wartawan akan dikenal, dihargai dan bermartabat di mata masyarakat karena tulisan, berita, dan karya jurnalistiknya.

²⁰ Masduki, 2004, *kebebasan Pers dan Kode Etik Jurnalistik*, Ypogyakarta : UII Press. H 35

Pada hakekatnya, wartawan itu tidak dilahirkan, tetapi diciptakan. Jurnalisme adalah perpaduan antara seni dan ilmu. Itulah sebabnya mengandalkan bakat saja tidaklah cukup untuk dijadikan modal sebagai wartawan. Dengan demikian, bukan suatu jaminan bagi lulusan jurnalistik akan menjadi seorang wartawan yang handal, tetapi secara teoritis dan keilmuan mereka sengat memenuhi.

Harus diakui bahwa pada umumnya wartawan menjadi besar dan ternama karena kemarihnya menggunakan apa yang dikatakan “indera keenam” yang tidak diperoleh atau ditemukan pada mata kuliah perguruan tinggi. Wartawan seperti ini menggunakan mayanaya lebih inspiratif dan tajam dibandingkan orang biasa, dan ia memasang telinganya bagaiakan hendak membuka tabor rahasia.

Di Indonesia, wartawan adalah sebuah profesi dan menjadi wartawan adalah pilihan professional. Bagaimana wartawan mendefinisikan pekerjaan akan mempengaruhi isi media yang ia produksi. Dalam UU Pers No. 49/1999 Bab I pasal I ayat I tentang Pers dan Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) beserta penjelasannya. Wartawan Indonesia menempuh cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Ada delapan atribut profesional wartawan di antaranya :

1. Menunjukkan identitas diri kepada narasumber
2. Menghormati hak privasi
3. Tidak menyuap
4. Menghasilkan berita yang factual dan jelas sumbernya
5. Rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan sumber dan ditampilkan secara berimbang.

6. Menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara.
7. Tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri.
8. Penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik.

Wartawan dituntut profesional semata-mata bukan hanya karena idealisme yang ada pada profesi tersebut, namun keprofesioanalan itu mempengaruhi media yang mempunyai efek cukup besar terhadap publik. Suatu profesi memerlukan semangat dan kesungguhan tertentu. Disiplin profesi mengikat setiap anggota yang telah bergabung ke dalam lingkaran profesi tersebut, sekaligus menolak hadirnya orang-orang yang tidak dapat memenuhi disiplin tersebut ketika seseorang memilih pekerjaannya sebagai wartawan.²¹

Perjuangan untuk mempertahankan kebebasan pers merupakan pekerjaan rumah utama AJI hingga kini. Ancaman bagi kebebasan pers itu ditandai oleh kian maraknya kasus gugatan, baik pidana maupun perdata, terhadap pers setelah reformasi. Ini diperkuat oleh statistik kasus kekerasan terhadap jurnalis masih relative tinggi, meski statistik jumlah kasus yang dimiliki AJI cukup fluktuatif.

Persoalan impunitas masih mendera berbagai kasus pembunuhan jurnalis. Seperti kasus pembunuhan Fuad Muhammad Syafruddin wartawan Harian Bernas Yogyakarta, 1996. AJI memberikan perhatian serius atas perkembangan tiap tahun

²¹ Pamela j. Shoemaker dan Stephen D. Reese. 1996, *Mediating The Message, Theories of Influences on Mass Media Content*, USA: Longman Publisher. h 65

kasus ini. Untuk menghargai dedikasinya kepada profesi, AJI menggunakan nama Udin Award sebagai penghargaan yang diberikan setiap tahun kepada jurnalis yang menjadi korban saat menjalankan tugas jurnalistiknya.

Bagi AJI, pers profesional merupakan prasyarat mutlak untuk membangun kultur pers yang sehat. Dengan adanya kualifikasi jurnalis semacam itulah pers di Indonesia bisa diharapkan untuk menjadi salah satu tiang penyangga demokrasi. Salah satu program penting AJI yang berhubungan dengan etika adalah melakukan kampanye untuk menolak amplop atau pemberian dari nara sumber. AJI juga telah menggelar Uji Kompetensi Jurnalis yang pertama secara nasional pada Februari 2012, dan akan terus bergulir di berbagai AJI Kota.

Tema tentang kesejahteraan ini memang tergolong isu yang sangat ramai di media. Bagi AJI, kesadaran akan pentingnya isu ini sudah dimulai sejak Kongres AJI tahun 1997. Dalam kongres tersebut, dicetuskan untuk memberikan porsi layak kepada isu yang berhubungan dengan aspek ekonomi jurnalis. Salah satu bentuknya adalah dengan mendorong pembentukan serikat pekerja di masing-masing media.

F. Independensi

Makna “independen” bukan berarti “netral” seperti yang sering disalahpahami oleh publik. Netralitas hanyalah salah satu sikap atau pendirian wartawan dalam kebijaksanaan redaksional ketika hendak menyiarkan pemberitaan. Tetapi independensi wartawan mengandung makna lebih luas dari netralitas, yaitu sikap atau pendirian apa pun termasuk netral atau imparsial sesuai dengan pertimbangan profesional wartawan dengan mengingat tujuan pemberitaan demi kepentingan umum.

Independensi juga berarti bahwa wartawan tidak dapat ditekan oleh campur tangan dari pihak manapun, termasuk dari pemilik perusahaan pers situ sendiri. Kode Etik Jurnalistik yang disepakati oleh 29 organisasi wartawan dan perusahaan pers pada 14 Maret 2006 dan dikukuhkan oleh Dewan Pers pada 24 Maret 2006, menegaskan dalam Pasal 1; “Wartawan Indonesia bersikap independen”. Penafsiran kode etik itu mengatakan; “Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan dan intervensi pihak lain.

mengatakan bahwa seorang wartawan tidak mencari teman dan juga tidak mencari musuh. Walaupun kadang sulit untuk menolak jasa baik seseorang, tetapi bukan berarti menikmati yang ada dan malah akan berada pada posisi dimana independensi wartawan bisa disalahartikan karena kedekatan dengan seorang relasi. Tetapi bukan berarti wartawan menutup diri dengan dunia luar dan tidak melakukan hubungan sosial dengan orang-orang disekitarnya. Wartawan bukan seorang yang antisosial hanya berusaha untuk mengurangi hubungan yang dapat mempengaruhi independensinya terhadap sebuah pemberitaan nantinya.²²

Misal seorang wartawan yang bertugas di sebuah pengadilan memiliki 'hubungan yang terlalu baik' dengan kepala pengadilan, suatu saat terjadi tindak korupsi di pengadilan tersebut oleh sang kepala pengadilan, bukan tidak mungkin kualitas pemberitaan terhadap kepala pengadilan akan berbeda dengan fakta yang sebenarnya hanya karena 'hubungan yang terlalu baik' tersebut. Independensi harus

²² Bill dan Tom Rosenstiel Kovach. *Sembilan Elemen Jurnalisme*. (Jakarta: Yayasan Pantau. 2001). h 121

dilakukan dengan bebas nilai ditambah dengan keberanian seorang wartawan untuk mewartakan kebenaran serta berani untuk melawan berbagai tekanan yang datang kepada mereka.²³

Aliansi Jurnalisme Independen sebagai organisasi profesi wartawan yang memiliki misi meningkatkan profesionalisme jurnalis senantiasa bersikap tegas pada anggotanya yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik. AJI juga menyatakan para anggotanya senantiasa menjalankan tugasnya berdasarkan kode etik, sebab itu mereka selektif memilih anggota dan jumlahnya biasa tak banyak.

Salah satu poin kode etik yang saat ini getol dikampanyekan AJI yakni “Tolak Amplop”. Poin ini dianggap penting karena dapat memengaruhi kinerja wartawan di lapangan. Namun bagi wartawan, poin ini amat berat dilakukan di tengah kondisi kesejahteraan yang memprihatinkan saat ini. Anggota AJI sendiri juga kerap melanggar poin yang mereka kampanyekan itu. Aturan ketat yang diterapkan AJI berani mereka langgar demi tuntutan hidup maupun akibat tak sanggup menahan godaan, apalagi melihat wartawan lain di luar anggota AJI yang dapat lebih leluasa untuk menerima.

Padahal poin itu sangat penting karena terbukti seringkali mengubah independensi para wartawan. Wartawan yang melakukan tugasnya tanpa didasari sikap independen sama saja dengan penyebar berita bohong, membuat informasi yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Hal ini mencederai nilai dan kode etik

jurnalistik. Independensi sebuah karya jurnalistik bergantung pada pribadi wartawan yang menulisnya, siapa pun dia termasuk anggota AJI.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) meluncurkan upah layak jurnalis 2011 secara serentak di 16 kota, Kamis (20/1/2011). Ke-16 kota itu adalah: Jakarta, Surabaya, Kediri, Semarang, Yogyakarta, Medan, Bandar Lampung, Pontianak, Batam, Pekanbaru, Makassar, Kendari, Palu, Denpasar, Kupang, dan Jayapura.

Peluncuran standar upah layak jurnalis ini, merupakan bagian dari kampanye AJI untuk meningkatkan profesionalisme jurnalis yang selama ini terbentur soal kesejahteraan yang tidak layak. "Padahal, upah yang rendah bisa membuat jurnalis terjebak menjadi pragmatis, tidak independen dan rentan terhadap suap," kata Nezar Patria, Ketua Umum AJI Indonesia, dalam siaran persnya.

Standar upah layak ini ditetapkan setelah AJI yang berada di 16 kota itu melakukan survei berdasarkan komponen dan harga kebutuhan hidup layak, dengan mengukur perubahan biaya hidup seiring kenaikan harga barang di pasar. Survei dilakukan mulai Desember 2010 sampai pertengahan Januari 2011. AJI memilih tak menggunakan standar Upah Minimum Kota (UMK) yang selama ini dipakai acuan umum.

Komponen yang disurvei meliputi kebutuhan pangan, sandang, papan, hingga aneka kebutuhan lain seperti transportasi, komunikasi, estetika, bacaan, rekreasi, hingga sosial kemasyarakatan. AJI juga memasukkan komponen kebutuhan pembelian laptop yang pembayarannya dicicil antara dua hingga tiga tahun.

Komputer jinjing tak bisa dikategorikan sebagai 'barang mewah' karena merupakan alat penunjang kinerja. AJI juga memasukkan tabungan 10 pesen yang diperoleh dari total upah layak jurnalis.

Berdasarkan hasil survei tersebut, inilah upah layak yang mestinya diberikan kepada jurnalis muda yang baru diangkat menjadi karyawan tetap:

Jakarta : Rp 4. 748.919

Surabaya : Rp 3.864.850

Kediri : Rp 2.836.557

Semarang : Rp 3.240.081

Yogyakarta : Rp 3.147.980

Medan : Rp 3.816.120

Bandar Lampung : Rp 2.568.462

Pontianak : Rp 3.526.600

Batam : Rp 4.243.030

Pekanbaru : Rp 3.604.700

Makassar : Rp 4.037.226

Kendari : Rp 2.972.000

Palu : Rp 2.150.066

Denpasar : Rp 3.894.583

Kupang : Rp 3.929.228

Jayapura : Rp 6.414.320

Di luar upah layak minimum ini, AJI meminta agar perusahaan media menerapkan sistem kenaikan upah reguler dengan memperhitungkan angka inflasi, prestasi kerja, jabatan, dan masa kerja. "Selain itu kami juga meminta perusahaan media memberikan sejumlah jaminan, seperti asuransi keselamatan kerja, jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial bagi keluarganya," kata Winuranto Adhi, Koordinator Divisi Serikat Pekerja AJI Indonesia.

Standar ini memang masih jauh dengan fakta yang bisa dilihat di lapangan. Survei AJI di berbagai kota tersebut menemukan bahwa ada jurnalis yang jauh di bawah itu, malah lebih rendah dari upah minimum kota. Di Palu, misalnya. Jurnalis di harian Media Alkhairaat dan mingguan Deadlinenews mendapat gaji pokok Rp 500 ribu. Padahal, upah minimum Palu Rp 827.500.

Di Medan, Sumatera Utara, jurnalis radio City FM dan Star News, juga memperoleh upah Rp 500 ribu-Rp 700 ribu --malah ada yang diupah berdasarkan hitungan berita. Di Medan, upah minimum provinsi-nya adalah Rp 1.197.000, hampir mendekati UMP Jakarta Rp 1.290.000.

Situasi serupa ditemui di Semarang. Gaji jurnalis di Semarang TV, di Semarang, Jawa Tengah, Rp 700 ribu, tanpa mendapatkan tunjangan transportasi dan komunikasi. Upah minimum daerah ini adalah Rp 961.323.

Di Kediri Jawa Timur, jurnalis KSTV mendapatkan upah Rp 300 ribu pada masa percobaan dan hanya bertambah sekitar Rp 200 ribu setelah diangkat sebagai karyawan. Di Dhoho TV, upah reporternya berkisar Rp 400 ribu. Padahal, upah minimumnya Rp 973.950.

Di Kupang, Nusa Tenggara Timur, harian Kota Kursor memberi upah Rp 650 ribu --padahal upah minim provinsinya Rp 850 ribu.

Tak semua perusahaan media memberikan upah yang di bawah standar AJI. Setidaknya, berdasarkan survei organisasi jurnalis ini, ada tiga media yang memberikan gaji di atas upah layak, yaitu Bisnis Indonesia (Rp 5 juta), The Jakarta Post (Rp 5,5 juta), dan Jakarta Globe (Rp 5,5 juta).

G. Jurnalistik

1. Sejarah Jurnalistik

Secara Gamblang, orang sering kali menyamakan jurnalistik dengan pers, bahkan ada yang menyamakan jurnalistik sebagai surat kabar. Ini disebabkan oleh media massa yang pertama kali diciptakan manusia adalah surat kabar. Tak heran jika orang mencampuradukan antara jurnalistik dan media cetak.

Seiring dengan majunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat, sehingga menghasilkan radio, televise, dan film, jurnalistik pun menjadi semakin luas cakupannya. Jurnalistik tidak lagi mengelola laporan harian untuk sarana media cetak

(terutama surat kabar), tetapi juga sarana media elektronik (terutama radio dan televisi). Bahkan kini telah merambah hingga ke media online (misalnya surat kabar online).²⁴

2. Pengertian Jurnalistik

Untuk memahami jurnalistik dapat ditinjau dari tiga sudut pandang yaitu: harfiah (etimologi), konseptual (terminology), dan praktis.

Pertama, jurnalistik secara harfiah atau terminology artinya kewartawanan atau kepenulisan. Kata dasarnya jurnal, artinya ‘laporan’ atau ‘catatan’, atau *jour* dalam bahasa Prancis yang berarti hari (*day*). Asal muasalnya dari bahasa Yunani kuno, *du jour* yang berarti ‘hari’, yakni kejadian hari ini yang diberitakan dalam lembaran tercetak. Tak heran, jika jurnalistik sering diindetikkan banyak orang dengan hal-hal yang berhubungan dengan media cetak, terutama surat kabar.²⁵

Kedua, jurnalistik secara konseptual (terminologi) mengandung tiga pengertian, yaitu sebagai berikut.

- a. Jurnalistik adalah proses “aktivitas” atau “kegiatan” mencari, mengumpulkan, menyusun, mengolah, mengedit, menyajikan, dan menyebarluaskan berita kepada khalayak melalui saluran media massa.
- b. Jurnalistik adalah “keahlian” (*expertise*) atau “keterampilan” (*skill*) menulis karya jurnalistik (*news, views dan feature*), termasuk keahlian dalam pencarian berita, peliputan peristiwa (*reportase*), dan wawancara (*interview*).
- c. Jurnalistik adalah bagian dari “bidang kajian” komunikasi atau publisistik, khususnya mengenai pembuatan dan penyebaran informasi (peristiwa, opini atau pendapat, pemikiran, idea tau gagasan) melalui media massa (cetak,

²⁴ Indah Suryawanti. *Jurnalistik Suatu Pengantar Teori dan praltik* h. 3

²⁵ Indah Suryawanti. *Jurnalistik Suatu Pengantar Teori dan praltik* h. 4

elektronik, dan online). Jurnalistik tergolong ilmu terapan (*applied science*) yang sifatnya dinamis dan terus berkembang seiring perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, serta dinamika masyarakat itu sendiri.²⁶



²⁶Indah Suryawanti..*Jurnalistik Suatu Pengantar Teori dan praltik* h 5.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan lokasi penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah yang digunakan untuk melaksanakan penelitian, hal ini diperlukan agar penelitian lebih terarah dan rasional. Untuk itu, diperlukan metode yang sesuai dengan objek yang diangkat karena metode berfungsi sebagai cara mengerjakan sesuatu untuk mendapatkan hasil yang optimal dan dipertanggung jawabkan.²⁷

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif, sedangkan definisi penelitian kualitatif adalah suatu teknik yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang berkarakteristik kualitatif (misalnya data tersebut berupa data non-numerik transkripsi verbatim atas wacana subjek, catatan dari studi observasi partisipan atau data yang berupa arsip atau dokumen)²⁸

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi yang menjadi objek penelitian penulis yakni Aliansi Jurnalis Independent (AJI) Makassar

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan komunikasi. Secara terminologi, komunikasi dapat di definisikan sebagai suatu

²⁷Anton Baker, *Metode Filsafat* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), h.10

²⁸Dedy Mulyana, *Metode penelitian kualitatif* (Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya, 2002), h. 147.

mekanisme mengadakan hubungan antara sesama manusia dengan mengembangkan semua lambang-lambang dan pikiran bersama dengan arti yang menyertainya.²⁹

Berakar pada latar alamiah sebagai kebutuhan, manusia serta alat penelitian memanfaatkan metode kualitatif, mengandalkan analisis dan induktif, mengarahkan sasaran penelitiannya pada usaha mengembangkan teori, bersifat deskriptif dengan mementingkan proses dari pada hasil, membatasi studi dengan fokus memiliki seperangkat kriteria untuk memeriksa keabsahan data.³⁰

C. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung di lapangan. Data primer penulis peroleh dari observasi dan juga didapatkan melalui proses wawancara dengan informan

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui telaah pustaka dan dari dokumen atau arsip-arsip yang terdapat pada AJI.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data. Adapun pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Library Research (Riset Kepustakaan)

Library research adalah kegiatan mencari dan mengelola data-data literatur yang sesuai untuk dijadikan referensi dan di jadikan sebagai acuan dasar untuk

²⁹Arifuddin Tike, *Dasar-Dasar Komunikasi : Suatu Studi dan Aplikasi* (Cet. 1 Agustus 2009, kota kembang Yogyakarta), h. 2.

³⁰Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. 25; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), h.8.

menerangkan konsep-konsep penelitian. Berdasarkan bentuk penelitian ini, data literature yang dimaksud adalah berupa buku, ensiklopedi, karya tulis ilmiah dan sumber data lainya yang didapat dari beberapa perpustakaan.

b. Field research (Riset Lapangan)

Jenis pengumpulan data ini menggunakan beberapa cara yang dianggap relevan dengan penelitian yaitu :

1.) Observasi

Kegiatan observasi adalah kegiatan yang setiap saat kita lakukan. Dengan perlengkapan panca indera yang dimiliki manusia terutama mata dan telinga maka sebenarnya kita sering melakukan observasi dengan mengamati objek-objek disekitar kita.³¹ Dalam observasi ini, calon peneliti ingin mendapatkan data yang terkait dengan fokus masalah yang akan diteliti dengan cara terjun langsung kelapangan yang menjadi objek penelitian.

2.) Wawancara

Metode wawancara atau *interview* merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara tatap muka, pertanyaan diberikan secara lisan dan jawabanya pun diterima secara lisan pula.³²

Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam yaitu suatu cara mengumpulkan data atau informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan informan agar mendapatkan data lengkap dan mendalam.³³

³¹Rachmat Criyanto, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, dengan kata pengantar oleh Burhan Bungin, Edisi 1 (Cet, IV ; Jakarta, kencana, 2009), h 108

³²Nana Syaodih Sukmadinata, *pengembangan kurikulum Teori dan Praktek* (Bandung: Remaja rosdakarya, 2009), h 222.

³³Husaini usman dan poernomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Cet. IV; Jakarta; PT. Bumi Aksara, 2011)), h. 73

Narasumber pada penelitian ini adalah Pengurus dan anggota AJI Makassar yaitu :

- a) Sekretaris Umum AJI : Ridwan Marzuki
- b) Koordiv. Serikat Dan Pekerja AJI : Nurdin Amir
- c) Anggota AJI : Supyan Umar
- d) Anggota AJI : Mustafa
- e) Anggota AJI : Aan Pranata

3.) Dokumentasi

Metode Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan benda-benda tertulis seperti buku, majalah, dokumentasi, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.³⁴ Berdasarkan pengertian tersebut, penulis dengan pengumpulan data dengan teknik dokumentasi berarti peneliti melakukan pencarian dan pengambilan segala informasi yang sifatnya teks menjelaskan dan menguraikan mengenai hubungannya dengan arah penelitian.

E. Instrumen Penelitian

Salah satu faktor penunjang keberhasilan sebuah penelitian adalah instrumen atau alat yang digunakan. Dalam pengumpulan data dibutuhkan beberapa alat untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam sebuah penelitian.

Penulis akan menggunakan beberapa instrument yaitu mencatat hasil observasi dan wawancara, pedoman wawancara dan telah dipustakakan seperti buku, foto dokumen serta alat penunjang seperti kamera, perekam suara dan buku catatan.

³⁴Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta:UGM Press, 1999), h.72

F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data

Analisi data dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data-data bersifat penelitian kualitatif untuk menemukan yang diinginkan oleh calon peneliti. Pengelolaan data yang ada selanjutnya diinterpretasikan dalam bentuk konsep yang dapat mendukung objek pembahasan.

Setelah peneliti memperoleh data dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data. Pengolahan data hasil observasi dilakukan dengan mengumpulkan dan mencatat hasil dari apa yang diamati di lapangan. Pengolahan data dari hasil wawancara dilakukan dengan cara peneliti mendengarkan ulang rekaman wawancara lalu di tulis kembali. Sedangkan pengolahan data dari hasil dokumentasi dilakukan dengan mengambil gambar pada saat melakukan penelitian di Aji Makassar.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum AJI (Aliansi Jurnalis Independen)

1. Profil AJI

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) lahir sebagai perlawanan komunitas pers Indonesia terhadap kesewenang-wenangan rezim Orde Baru. Mulanya adalah pembredelan Detik, Editor dan Tempo, 21 Juni 1994. Ketiganya dibredel karena pemberitaannya yang tergolong kritis kepada penguasa. Tindakan represif inilah yang memicu aksi solidaritas sekaligus perlawanan dari banyak kalangan secara merata di sejumlah kota.

Setelah itu, gerakan perlawanan terus mengkristal. Akhirnya, sekitar 100 orang yang terdiri dari jurnalis dan kolumnis berkumpul di Sirnagalih, Bogor, 7 Agustus 1994. Pada hari itulah mereka menandatangani Deklarasi Sirnagalih. Inti deklarasi ini adalah menuntut dipenuhinya hak publik atas informasi, menentang pengekangan pers, menolak wadah tunggal untuk jurnalis, serta mengumumkan berdirinya AJI.

Pada masa Orde Baru, AJI masuk dalam daftar organisasi terlarang. Karena itu, operasi organisasi ini di bawah tanah. Roda organisasi dijalankan oleh dua puluhan jurnalis-aktivis. Untuk menghindari tekanan aparat keamanan, sistem manajemen dan pengorganisasian diselenggarakan secara tertutup. Sistem kerja organisasi semacam itu memang sangat efektif untuk menjalankan misi organisasi, apalagi pada saat itu AJI hanya memiliki anggota kurang dari 200 jurnalis.

Selain demonstrasi dan mengecam tindakan represif terhadap media, organisasi yang dibidangi oleh individu dan aktivis Forum Wartawan Independen (FOWI) Bandung, Forum Diskusi Wartawan Yogyakarta (FDWY), Surabaya Press Club (SPC) dan Solidaritas Jurnalis Independen (SJI) Jakarta ini juga menerbitkan majalah alternatif Independen, yang kemudian menjadi Suara Independen.

Gerakan bawah tanah ini menuntut biaya mahal. Tiga anggota AJI, yaitu Ahmad Taufik, Eko Maryadi dan Danang Kukuh Wardoyo dijebloskan ke penjara, Maret 1995. Taufik dan Eko masuk bui masing-masing selama 3 tahun, Danang 20 bulan. Menyusul kemudian Andi Syahputra, mitra penerbit AJI, yang masuk penjara selama 18 bulan sejak Oktober 1996.

Selain itu, para aktivis AJI yang bekerja di media dibatasi ruang geraknya. Pejabat Departemen Penerangan dan Persatuan Wartawan Indonesia juga tidak segan-segan menekan para pemimpin redaksi agar tidak memperkerjakan mereka di mediana.

Konsistensi dalam memperjuangkan misi inilah yang menempatkan AJI berada dalam barisan kelompok yang mendorong demokratisasi dan menentang otoritarianisme. Inilah yang membuahkan pengakuan dari elemen gerakan pro demokrasi di Indonesia, sehingga AJI dikenal sebagai pembela kebebasan pers dan berekspresi.

Pengakuan tak hanya datang dari dalam negeri, tetapi juga dari manca negara. Diantaranya dari International Federation of Journalist (IFJ), Article XIX dan International Freedom Expression Exchange (IFEX). Ketiga organisasi internasional

tersebut kemudian menjadi mitra kerja AJI. Selain itu banyak organisasi-organisasi asing, khususnya NGO internasional, yang mendukung aktivitas AJI. Termasuk badan-badan PBB yang berkantor di Indonesia.

AJI diterima secara resmi menjadi anggota IFJ, organisasi jurnalis terbesar dan paling berpengaruh di dunia, yang bermarkas di Brussels, Belgia, pada 18 Oktober 1995. Aktivis lembaga ini juga mendapat beberapa penghargaan dari dunia internasional. Di antaranya dari Committee to Protect Journalist (CPJ), The Freedom Forum (AS), International Press Institute (IPI-Wina) dan The Global Network of Editors and Media Executive (Zurich).

Setelah Soeharto jatuh, pers mulai menikmati kebebasan. Jumlah penerbitan meningkat. Setelah reformasi, tercatat ada 1.398 penerbitan baru. Namun, hingga tahun 2000, hanya 487 penerbitan saja yang terbit. Penutupan media ini meninggalkan masalah perburuhan. AJI melakukan advokasi dan pembelaan atas beberapa pekerja pers yang banyak di-PHK saat itu.

Selain bergugurannya media, fenomena yang masih cukup menonjol adalah kasus kekerasan terhadap jurnalis. Berdasarkan catatan AJI, setelah reformasi, kekerasan memang cenderung meningkat. Tahun 1998, kekerasan terhadap jurnalis tercatat sebanyak 42 kasus. Setahun kemudian, 1999, menjadi 74 kasus dan 115 di tahun 2000. Setelah itu, kuantitasnya cenderung menurun: sebanyak 95 kasus (2001), 70 kasus (2002) dan 59 kasus (2003).

Kasus yang tergolong menonjol pada tahun 2003 adalah penyanderaan terhadap wartawan senior RCTI Ersi Siregar dan juru kamera RCTI, Ferry Santoro.

AJI terlibat aktif dalam usaha pembebasan keduanya, sampai akhirnya Fery berhasil dibebaskan. Namun, Ersi Siregar meninggal dalam kontak senjata antara TNI dan penyanderaanya, Gerakan Aceh Merdeka.

Pada saat yang sama, juga mulai marak fenomena gugatan terhadap media. Beberapa media yang digugat ke pengadilan - pidana maupun perdata adalah Harian Rakyat Merdeka, Kompas, Koran Tempo, Majalah Tempo dan Majalah Trust. Atas kasus-kasus tersebut, AJI turut memberikan advokasi.

Selain itu, AJI juga membuat program Maluku Media Center. Selain sebagai safety office bagi jurnalis di daerah bergolak tersebut, program itu juga untuk kampanye penerapan jurnalisme damai. Sebab, berdasarkan sejumlah pengamat dan analis, peran media cukup menonjol dalam konflik bernuansa agama tersebut. Hingga kini, program tersebut masih berjalan.

Setelah rezim Orde Baru tumbang oleh “Revolusi Mei 1998”, kini Indonesia mulai memasuki era keterbukaan. Rakyat Indonesia, termasuk jurnalis, juga mulai menikmati kebebasan berbicara, berkumpul dan berorganisasi. Departemen Penerangan, yang dulu dikenal sebagai lembaga pengontrol media, dibubarkan. Undang-Undang Pers pun diperbaiki sehingga menghapus ketentuan-ketentuan yang menghalangi kebebasan pers.

AJI, yang dulu menjadi organisasi terlarang, kini mendapat keleluasaan bergerak. Jurnalis yang tadinya enggan berhubungan dengan AJI, atau hanya bisa bersimpati, mulai berani bergabung. Jumlah anggotanya pun bertambah.

Perkembangan jumlah anggota akibat perubahan sistem politik ini, tentu saja, juga mengubah pola kerja organisasi AJI.

Kini, AJI tak bisa lagi sekedar mengandalkan idealisme dan semangat para aktivisnya untuk menjalankan visi dan misi organisasi. Pada akhirnya, organisasi ini mulai digarap secara profesional. Bukan hanya karena jumlah anggotanya yang semakin banyak, namun tantangan dan masalah yang dihadapi semakin berat dan kompleks.

Sejak berdirinya, AJI mempunyai komitmen untuk memperjuangkan hak-hak publik atas informasi dan kebebasan pers. Untuk yang pertama, AJI memposisikan dirinya sebagai bagian dari publik yang berjuang mendapatkan segala macam informasi yang menyangkut kepentingan publik.

Mengenai fungsi sebagai organisasi pers dan jurnalis, AJI juga gigih memperjuangkan dan mempertahankan kebebasan pers. Muara dari dua komitmen ini adalah terpenuhinya kebutuhan publik akan informasi yang obyektif.

Untuk menjaga kebebasan pers, AJI berupaya menciptakan iklim pers yang sehat. Suatu keadaan yang ditandai dengan sikap jurnalis yang profesional, patuh kepada etika dan jangan lupa mendapatkan kesejahteraan yang layak. Ketiga soal ini saling terkait. Profesionalisme plus kepatuhan pada etika tidak mungkin bisa berkembang tanpa diimbangi oleh kesejahteraan yang memadai. Menurut AJI, kesejahteraan jurnalis yang memadai ikut mempengaruhi jurnalis untuk bekerja profesional, patuh pada etika dan bersikap independen.

Program kerja yang dijalankan AJI untuk membangun komitmen tersebut, antara lain dengan sosialisasi nilai-nilai ideal jurnalisme dan penyadaran atas hak-hak ekonomi pekerja pers. Sosialisasi dilakukan antara lain dengan pelatihan jurnalistik, diskusi, seminar serta penerbitan hasil-hasil pengkajian dan penelitian soal pers. Sedang program pembelaan terhadap hak-hak pekerja pers, antara lain dilakukan lewat advokasi, bantuan hukum dan bantuan kemanusiaan untuk mereka yang mengalami represi, baik oleh perusahaan pers, institusi negara, maupun oleh kelompok-kelompok masyarakat.

Berdasarkan keputusan Kongres AJI ke-V di Bogor, 17-20 Oktober 2003, ditetapkan bahwa bentuk organisasi AJI adalah perkumpulan. Namun, AJI Kota (seperti AJI Medan, AJI Surabaya, AJI Makassar, dan lainnya) mempunyai otonomi untuk mengatur rumah tangganya sendiri, kecuali dalam hal (1) berhubungan dengan IFJ, organisasi internasional tempat AJI berafiliasi dan pihak-pihak internasional lainnya; serta (2) mengangkat dan memberhentikan anggota.

Kekuasaan tertinggi AJI ada di tangan Kongres yang digelar setiap tiga tahun sekali. AJI dijalankan oleh pengurus harian dibantu Koordinator Wilayah dan Biro-biro khusus. Dalam menjalankan kepengurusan organisasi, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal AJI dibantu oleh beberapa koordinator divisi beserta anggotanya, yang didukung pula oleh manajer kantor serta staf pendukung.

Untuk mengontrol penggunaan dana organisasi dibentuklah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang anggotanya dipilih oleh Kongres. Majelis Kode Etik juga dipilih melalui Kongres. Tugas lembaga ini adalah memberi saran dan rekomendasi

kepada pengurus harian atas masalah-masalah pelanggaran kode etik organisasi yang dilakukan oleh pengurus maupun anggota.

Kepengurusan sehari-hari AJI Kota dilakukan oleh Pengurus Harian AJI Kota, yang terdiri atas Ketua, Sekretaris, Bendahara dan beberapa koordinator divisi. Mereka dipilih lewat Konferensi AJI Kota yang dilangsungkan setiap dua tahun sekali.

AJI membuka diri bagi setiap jurnalis Indonesia yang secara sukarela berminat menjadi anggota. Syarat terpenting adalah menyatakan bersedia menaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Kode Etik AJI. Bagi yang berminat, bisa menghubungi sekretariat AJI Indonesia, AJI kota atau AJI perwakilan luar negeri.

B. Konsep Profesionalisme dan independensi wartawan menurut AJI Makassar

Profe (*Profesionalisme*) penghargaan atas karya etika profesi berarti suatu cabang ilmu yang secara sistematis merefleksikan moral yang melekat pada suatu profesi. Etika profesi juga dipahami sebagai nilai-nilai dan asas moral yang melekat pada pelaksanaan fungsi profesionalisme tertentu dan wajib dilaksanakan oleh pemegang profesi itu.³⁵

Di Indonesia, wartawan adalah sebuah profesi dan menjadi wartawan merupakan pilihan profesional. Bagaimana wartawan mendefinisikan pekerjaan akan mempengaruhi isi media yang ia produksi. Dalam UU Pers No. 49/1999 Bab I pasal I

³⁵ Masduki, 2004, *kebebasan Pers dan Kode Etik Jurnalistik*, Yogyakarta : UII Press. H 35

ayat I tentang Pers dan Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) beserta penjelasannya. Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Ada delapan atribut profesional wartawan di antaranya :

1. Menunjukkan identitas diri kepada narasumber
2. Menghormati hak privasi
3. Tidak menyuap
4. Menghasilkan berita yang factual dan jelas sumbernya
5. Rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan sumber dan ditampilkan secara berimbang.
6. Menghormati pengalaman traumatis narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara.
7. Tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri.
8. Penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik.

Wartawan dituntut profesional semata-mata bukan hanya karena idealisme yang ada pada profesi tersebut, namun keprofesionalan itu mempengaruhi media yang mempunyai efek cukup besar terhadap publik. Suatu profesi memerlukan semangat dan kesungguhan tertentu. Disiplin profesi mengikat setiap anggota yang telah bergabung ke dalam lingkaran profesi tersebut, sekaligus menolak hadirnya orang-

orang yang tidak dapat memenuhi disiplin tersebut ketika seseorang memilih pekerjaannya sebagai wartawan.³⁶

Sedangkan makna “independen” bukan berarti “netral” seperti yang sering disalahpahami oleh publik. Netralitas hanyalah salah satu sikap atau pendirian wartawan dalam kebijaksanaan redaksional ketika hendak menyiarkan pemberitaan. Tetapi independensi wartawan mengandung makna lebih luas dari netralitas, yaitu sikap atau pendirian apa pun termasuk netral atau imparsial sesuai dengan pertimbangan profesional wartawan dengan mengingat tujuan pemberitaan demi kepentingan umum.

Independensi juga berarti bahwa wartawan tidak dapat ditekan oleh campur tangan dari pihak manapun, termasuk dari pemilik perusahaan pers situ sendiri. Kode Etik Jurnalistik yang disepakati oleh 29 organisasi wartawan dan perusahaan pers pada 14 Maret 2006 dan dikukuhkan oleh Dewan Pers pada 24 Maret 2006, menegaskan dalam Pasal 1; “Wartawan Indonesia bersikap independen”. Penafsiran kode etik itu mengatakan; “Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan dan intervensi pihak lain.

Pamela j. Shoemaker dan Stephen D. Reese mengatakan bahwa seorang wartawan tidak mencari teman dan juga tidak mencari musuh. Walaupun kadang sulit untuk menolak jasa baik seseorang, tetapi bukan berarti menikmati yang ada dan malah akan berada pada posisi dimana independensi wartawan bisa disalahartikan

³⁶ Pamela j. Shoemaker dan Stephen D. Reese. 1996, *Mediating The Message, Theories of Influences on Mass Media Content*, USA: Longman Publisher. h 65

karena kedekatan dengan seorang relasi. Tetapi bukan berarti wartawan menutup diri dengan dunia luar dan tidak melakukan hubungan sosial dengan orang-orang disekitarnya. Wartawan bukan seorang yang antisosial hanya berusaha untuk mengurangi hubungan yang dapat mempengaruhi independensinya terhadap sebuah pemberitaan nantinya.³⁷

Misal seorang wartawan yang bertugas di sebuah pengadilan memiliki 'hubungan yang terlalu baik' dengan kepala pengadilan, suatu saat terjadi tindak korupsi di pengadilan tersebut oleh sang kepala pengadilan, bukan tidak mungkin kualitas pemberitaan terhadap kepala pengadilan akan berbeda dengan fakta yang sebenarnya hanya karena 'hubungan yang terlalu baik' tersebut. Independensi harus dilakukan dengan bebas nilai ditambah dengan keberanian seorang wartawan untukewartakan kebenaran serta berani untuk melawan berbagai tekanan yang datang kepada mereka.³⁸

Aliansi Jurnalisme Independen sebagai organisasi profesi wartawan yang memiliki misi meningkatkan profesionalisme jurnalis senantiasa bersikap tegas pada anggotanya yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik. AJI juga menyatakan para anggotanya senantiasa menjalankan tugasnya berdasarkan kode etik, sebab itu mereka selektif memilih anggota dan jumlahnya biasa tak banyak.

³⁷ Bill dan Tom Rosenstiel Kovach. *Sembilan Elemen Jurnalisme*. (Jakarta: Yayasan Pantau. 2001). h 121

Salah satu poin kode etik yang saat ini getol dikampanyekan AJI yakni “Tolak Amplop”. Poin ini dianggap penting karena dapat memengaruhi kinerja wartawan di lapangan. Namun bagi wartawan, poin ini amat berat dilakukan di tengah kondisi kesejahteraan yang memprihatinkan saat ini. Menurut Supyan Umar Anggota AJI sendiri juga kerap melanggar poin yang mereka kampanyekan itu. Aturan ketat yang diterapkan AJI berani mereka langgar demi tuntutan hidup maupun akibat tak sanggup menahan godaan, apalagi melihat wartawan lain di luar anggota AJI yang dapat lebih leluasa untuk menerima.

Padahal poin itu sangat penting karena terbukti seringkali mengubah independensi para wartawan. Wartawan yang melakukan tugasnya tanpa didasari sikap independen sama saja dengan penyebar berita bohong, membuat informasi yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Hal ini mencederai nilai dan kode etik jurnalistik. Independensi sebuah karya jurnalistik bergantung pada pribadi wartawan yang menulisnya, siapa pun dia termasuk anggota AJI.

Sesuai yang dijelaskan pada BAB II Surat At Taubah 105 menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kita untuk bekerja, dan Allah pasti membalas semua apa yang telah kita kerjakan. Yang paling unik dalam ayat ini adalah penegasan Allah bahwa motivasi atau niat bekerja itu mestilah benar. Sebab kalau motivasi bekerja tidak benar, Allah akan membalas dengan cara memberi azab. Sebaliknya, kalau motivasi itu benar, maka Allah akan membalas pekerjaan itu dengan balasan yang lebih baik dari apa yang kita kerjakan

Apa yang dilakukan oleh AJI untuk membuat wartawan AJI menjadi professional dan independen. Supyan Umar salah satu anggota AJI mengatakan

“Secara sederhana dan berulang ulang interaksi, tentu interaksi dengan sesama anggota AJI komunikasi dua arah bisa personal atau kelompok misalnya diskusi diskusi dengan teman-teman yang lebih dulu bergabung, dan lebih berpengalaman, nah darisitu juga kita banyak belajar, bagaimana seharusnya jurnalis yang independen dan profesional³⁹

Untuk membentuk profesionalisme dan independensi pada wartawan, AJI menggunakan komunikasi dua arah yaitu personal dengan kelompok.

Independen dalam pemahaman pribadi seorang jurnalis menurut pribadi supyan Umar mengatakan

“Saya pribadi seorang jurnalis kalau saya pribadi lebih banyak belajar dikampus, menjadi beban karena setiap waktu dikampus lalu belajar etika dan macam-macam tentang independent. Dari kuliah otak sudah dicuci dan ditambah lagi masuk AJI. Kalau mau jadi jurnalis apapun alasanya harus profesionalis, walaupun qta butuh uang kita harus kerja keras dan harus tetap berusaha untuk mendapatkan uang yang betul betul dari hasil keringat kita sendiri. Tidak harus meminta-minta atau menerima amplop yang bukan dari upah⁴⁰.

Profe (*Profesionalisme*) penghargaan atas karya etika profesi berarti suatu cabang ilmu yang secara sistematis merefleksikan moral yang melekat pada suatu pofesi. Etika profesi juga dipahami sebagai nilai-nilai dan asas moral yang melekat pada pelaksanaan fungsi professionalsime tertentu dan wajib dilaksanakan oleh pemegang profesi itu.⁴¹ DI Indonesia wartawan adalah sebuah profesi dan menjadi wartawan adalah pilihan professional. Bagaimana wartawan mendefinisikan pekerjaanya akan mempengaruhi isi media yang ia produksi.

³⁹ Supyan Umar, Anggota AJI, Wawancara, Makassar 28 Februari 2016

⁴⁰ Supyan Umar, Anggota AJI, Wawancara, Makassar 28 Februari 2016

⁴¹ Masduki, 2004, *kebebasan Pers dan Kode Etik Jurnalistik*, Ypogyakarta : UII Press. H 35

Wartawan yang melanggar Kode etik AJI akan mendapatkan sanksi atas perbuatan pelanggaran yang dilakukan, seperti yang dikemukakan oleh Supyan Umar anggota AJI

“Tentu kalau ada anggota AJI yang menerima sogokan atau semacamnya maka akan ada tindakan dari pengurus AJI, di panggil untuk dimintai keterangan apakah dia betul melakukan dengan saksi dan alat bukti yang kuat, maka akan diberi sanksi berupa pemecatan atau semacamnya sesuai aturan-aturan yang berlaku di organisasi AJI, tapi dengan catatan bukti dan saksi yang kuat, misalnya ada narasumber yang melapor bahwa saya pernah memberikan barang atau uang ke wartawanya AJI.”⁴²

Makna “independen” bukan berarti “netral” seperti yang sering disalahpahami oleh publik. Netralitas hanyalah salah satu sikap atau pendirian wartawan dalam kebijaksanaan redaksional ketika hendak menyiarkan pemberitaan. Tetapi independensi wartawan mengandung makna lebih luas dari netralitas, yaitu sikap atau pendirian apa pun termasuk netral atau imparsial sesuai dengan pertimbangan profesional wartawan dengan mengingat tujuan pemberitaan demi kepentingan umum.

Ketika ada informasi bahwa anggota AJI ada yang kedapatan melanggar seperti menerima suap, maka akan ditindaki oleh pengurus AJI dan akan dimintai keterangan tentang informasi yang beredar.

AJI merupakan salah satu lembaga jurnalis yang ada di Makassar dan memiliki anggota yang banyak. Seperti yang dijelaskan oleh Ridwan Marzuki Sekjen AJI Makassar.

⁴² Supyan Umar, Anggota AJI, *Wawancara*, Makassar 28 Februari 2016

“AJI Kota Makassar memiliki anggota kurang lebih 110 orang yang berasal dari latar belakang media yang berbeda dengan cara perekrutan tidak memandang apa latar belakang mereka, secara fundamental mereka mau menjalankan kode etik jurnalis.”⁴³

AJI memiliki anggota dari berbagai latar belakang media yang ada di Makassar, dan mereka sudah melalui tahap perekrutan yang dilakukan oleh AJI Makassar

Setiap wartawan AJI memiliki penghasilan cenderung yang berbeda-beda tergantung dari media tempat mereka bekerja. Nurdin Amir selaku Koordinator Divisi Serikat mengatakan

“Persoalan independensi wartawan banyak anggota AJI yang berasal dari media yang berbeda-beda penghasilan mereka pun cenderung beragam dalam setiap bulannya. Akan tetapi dalam proses penyajian mereka dari perusahaan media tempat mereka bekerja ada yang dibiayai oleh UMP, ada yang dari provinsi, ada juga yang di bawahhi bahkan ada juga yang melambung jauh diatas, misal Pimpred, direktur.”⁴⁴

Untuk pengaruh kesejahteraan Wartawan AJI, bisa dilihat dari jabatan yang dipegang oleh anggota AJI di media yang ada di Makassar.

Ada dua peran utama untuk diterima bergabung sebagai anggota AJI, menurut Supyan Umar yang sudah 2 tahun bergelut di AJI mengatakan,

“pertama yaitu menerima mereka yang baik. Baik itu dalam artian mereka yang profesional. Yang ke dua menerima mereka yang tidak baik, belum memiliki kode etik jurnalis, belum profesional, belum memiliki kompetensi akan tetapi memiliki keinginan untuk berubah yang diinginkan saat mendaftar. Orang-orang yang sudah baik itu memiliki waktu lebih cepat untuk bergabung di AJI. Dan untuk mereka yang belum profesional itu akan diarahkan mengikuti diklat-diklat yang berangkai di jurnalis. Jika wartawan itu masih

⁴³ Ridwan Marzuki, Sekjen AJI, *Wawancara Makassar* 28 Februari 2016

⁴⁴ Nurdin Amir Anggota AJI, *Wawancara Makassar* 28 Februari 2016

muda atau wartawan baru, maka anggota AJI akan memberikan arahan serta binaan untuk memenuhi syarat utama bergabung di AJI⁴⁵

Orang yang profesional akan mudah masuk di AJI. Dan mereka yang belum profesional belum memiliki kompetensi akan tetapi keinginan untuk berubah yang diinginkan saat mendaftar.

Semua calon anggota AJI harus mengetahui Kode etik yang dibuat oleh AJI seperti yang dikatakan Ridwan Marzuki

Calon anggota AJI itu adalah calon anggota yang mematuhi kode etik yang dibuat oleh AJI, bertanda tangan bahwa siap mengikuti dan mematuhi peraturan kode etik jurnalis dan tiga rekomendasi dari anggota aji, maka calon anggota tersebut baru bisa mendaftar⁴⁶

AJI memiliki kode etik dan semua calon anggota baru harus mematuhi peraturan tersebut.

Aji membuka pendaftaran sekali setahun, dan pendaftaran dibuka ketika banyak wartawan baru. Seperti yang dikatakan oleh Mustafa

“Pendaftaran AJI dibuka sekali setahun, sesuai kebutuhan, atau ketika anggota AJI melihat begitu banyak wartawan baru bergabung di media yang memiliki kompetensi. Wartawan baru lebih muda dibina dan diarahkan menjadi lebih baik untuk praktik jurnalis Indonesia⁴⁷

AJI akan membuka pendaftaran sekali setahun ketika AJI butuh wartawan.

Media tetap memberikan upaya layak standar sesuai UMP, karenan AJI tidak melakukan survey terhadap upah. Sesuai yang dijelaskan oleh Ridwan Marzuki

“Perusahaan media sekarang memberikan upah standar sesuai UMP padahal ada upah yang sektoral, karena AJI tidak melakukan survey terhadap upah yang sektoral itu sehingga AJI juga tidak memiliki pegangan kuat untuk

⁴⁵ Supyan Umar Anggota AJI, *Wawancara* Makassar 28 Februari 2016

⁴⁶ Ridwan Marzuki, Sekjen AJI, *Wawancara* Makassar 28 Februari 2016

⁴⁷ Mustafa, Anggota AJI, *Wawancara* Makassar 28 Februari 2016

mengetahui upah sektoral itu. Adanya keterbatasan teman-teman maka survey itu jarang dilakukan lagi untuk mengetahui upah sektoral wartawan⁴⁸

Media sekarang ini memberikan upaya standar UMP jadi AJI sudah tidak melakukan survey terhadap upah tersebut.

Perusahaan media juga cenderung melihat profesional kerja. Akan memberika dampak kepada wartawan baru. Aan pranata mengatakan

“Perusahaan media juga cenderung melihat profesionalisme kerja. Bagi wartawan baru itu akan digaji tidak UMP. Cuma persoalannya ketika wartawan baru memiliki kontrak kerja jadi wartawan tersebut sudah memiliki wewenang untuk memiliki upah. Karena dalam kontrak kerja itu memang dicantumkan upah wartawan.⁴⁹

Jadi AJI tidak mempunyai pegangan yang kuat untuk melakukan advokasi. Kecuali jika upah wartawan baru tidak sesuai dengan gaji yang dicantumkan dalam kontrak kerja baru AJI melakukan suatu advokasi kepada media tersebut.

C. Standar Upah Layak yang Diterapkan Media Terhadap Wartawan di Makassar Menurut AJI.

Penghasilan wartawan AJI bermacam-macam ada yang standar UMP ada juga yang sudah tingkat tinggi seperti Pimred dan Direktur.

Wartawan yang memiliki status kontributor yang memiliki kemitraan dengan perusahaan media tempat mereka bekerja. Sesuai yang dijelaskan Ridwan Marzuki Sekjen AJI Makassar

⁴⁸ Ridwan Marzuki Sekjen AJI, *Wawancara* Makassar 28 Februari 2016

⁴⁹ Aan Pranata, Anggota AJI, *Wawancara* Makassar 28 Februari 2016

“Dan memang yang paling miris adalah wartawan-wartawan baru yang berstatus sebagai kontributor kemudian berstatus juga sebagai kemitraan dengan perusahaan medianya. Jadi mereka diangkat sebagai karyawan tapi dipekerjakan menyediakan jasa bahkan dianggap sebagai mitra bagi perusahaannya. Dalam artian ketika media tidak punya berita maka media tersebut tidak memiliki kemitraan profesional atau kemitraan kerja⁵⁰”.

Ketika wartawan yang memiliki status sama di perusahaannya dan mereka diangkat sebagai karyawan dan dipekerjakan, dalam artian ketika media tidak punya berita maka media tersebut tidak memiliki rasa profesional.

Tingkat keprofesionalisan seorang wartawan bisa menjadi tolak ukur mengenai gaji yang layak untuk wartawan tersebut. Seperti yang dikemukakan oleh Aan Pranata salah satu anggota AJI

“wartawan yang diberi gaji dibawah standar memang cenderung wartawan tersebut belum memiliki profesionalisme yang standar pula serta belum memenuhi sertifikasi jurnalis yang sudah menjadi amanat dewan pers. Namun memang ada wartawan yang memiliki semua itu tapi gaji mereka masih di bawah standar⁵¹”.

Wartawan yang belum memiliki sertifikat jurnalis akan memiliki gaji masih dibawah standar karena wartawan tersebut memiliki profesionalisme yang standar.

Ada beberapa media yang memberikan batasan batasan perusahaan media yang mampu memberi gaji jurnalis. Seperti yang dijelaskan oleh nurdi namir salah satu .anggota AJI Makassar

“Di Makassar ada beberapa perusahaan media yang mampu memberi gaji jurnalis secara standar dan memenuhi kebutuhan sentral wartawan. Jika misalnya UMP 2,1 juta atau 2,2 juta mestinya ada penambahan 600 ribu upah layak wartawan yakni menjadi 2,8 juta dan tidak bisa disetarakan dengan buruh biasa⁵²”.

⁵⁰ Ridwan Marzuki, Sekjen AJI, *Wawancara* Makassar 28 Februari 2016

⁵¹ Aan Pranata, Anggota AJI, *Wawancara* Makassar 28 Februari 2016

⁵² Nurdin Amir, Anggota AJI, *Wawancara* Makassar 28 Februari 2016

Ada beberapa media dimakassar yang memberi gaji sesuai dengan kebutuhan central

Konsep independensi sangat luas, ada indepedensi media, independensi individu, indepedensi secara internal, serta independensi secara profesional. Nurdin Amir mengatakan

“Dalam redaksi independensi berada dalam diri wartawan dan terutama dalam menjalankan tugas jurnalistik. Independensi itu sangat menentukan sikap mereka dalam menjalankan kode etik tanpa dipengaruhi oleh siapapun dalam memberitakan berita fakta yang mereka dapatkan politik⁵³”

Syarat independen itu tidak terikat dalam kepentingan manapun baik dalam kepentingan politik dan sebagainya. Independensi tidak termasuk dalam suatu kubu atau organisasi manapun karena wartawan sifatnya imparsial.

Kesejahteraan wartawan tergantung dari perusahaan media tempat wartawan tersebut bekerja. supyan umar⁵⁴ mengatakan

“AJI melakukan penguatan kompetensi, termasuk melakukan sertifikasi wartawan sehingga syarat minimal untuk meningkatkan kesejahteraan wartawan terpenuhi. Kualitas, langkah linear dan kuantitas harus dimiliki wartawan. Dalam artian wartawan yang memiliki kualitas yang lebih baik maka akan mendapatkan nilai jual yang lebih baik pula. Wartawan yang profesional cenderung mendapatkan upah yang lebih dibandingkan wartawan tidak profesional”

Kompetensi yang dilakukan oleh AJI sangat bermanfaat bagi wartawan karena dengan adanya sertifikasi wartawan bisa memenuhi kesejahteraannya.

⁵³ Nurdin Amir, Anggota AJI, *Wawancara*, Makassar 28 Februari 2016

⁵⁴ supyan umar, Anggota AJI, *Wawancara*, Makassar 28 Februari 2016

Jadi media sekarang lebih cenderung ke profesionalisme cara kerja seorang wartawan, karna wartawan baru itu akan dimakan tdak sesuai UMP. Nurdin Amir mengatakan

“Perusahaan media juga cenderung melihat profesionalisme kerja. Bagi wartawan baru itu akan digaji tidak UMP. Cuma persoalannya ketika wartawan baru memiliki kontrak kerja jadi wartawan tersebut sudah memiliki wewenang untuk memiliki upah. Karena dalam kontrak kerja itu memang dicantumkan upah wartawan.⁵⁵”

Perusahaan media akan menerima wartawan yang nampak profesionaln dengan standar UMP, sebaliknya agi wartawan baru itu akan digaji bukan standar UMP.

Perjuangan upah layak jurnalis untuk memperjuangkan kesejahteraan jurnalis sangat berpengaruh kedepanya mengenai upah layak pada AJI. Nurdin Amir menambahkan

“Bagi AJI, perjuangan soal upah layak untuk jurnalis ini merupakan bagian dari kampanye kesejahteraan jurnalis. Sebab, AJI punya keyakinan yang sangat kuat bahwa kesejahteraan jurnalis punya korelasi langsung dan signifikan dengan profesionalisme. Kesejahteraan yang layak memang bukan jaminan bahwa wartawan bisa bersikap profesional. Tapi, kesejahteraan yang memadai memiliki peluang besar untuk jurnalis agar lebih bersikap⁵⁶”

Kesejahteraan jurnalis merupakan suatu perjuangan bagi AJI, sehinga dapat memberikan kesejahteraan yang memadai untuk memiliki pluang sebagai jurnalis yang profesional.

Dalam kehidupan ini semua wartawan ingin hdup sejahtera, apakah dengan mempunyai sikap yang profesional bisa memberikan kesejahteraan kepada wartawan.

Nurdin Amir mengungkap

program yang terkait soal kesejahteraan jurnalis tak kalah dalam soal prioritas dengan isu kebebasan pers dan profesionalisme. Sebab, ketiganya saling

⁵⁵ Nurdin Amir, Anggota AJI, *wawanvara*, Makassar, 28 Februari 2016

⁵⁶ Nurdin Amir, Anggota AJI, *wawanvara*, Makassar, 28 Februari 2016

berkelindan. Sikap mengabaikan salah satu dari ketiga sisi itu bukan hanya ahistoris, tapi juga tak bijak. Sebab keterikatan antara ketiganya cukup erat. Bisakah kebebasan pers didapat, dan dipertahankan, jika jurnalis yang bekerja di media tidak mendapatkan kesejahteraan? Bisakah jurnalis bersikap profesional jika kebutuhan hidupnya tak terpenuhi secara layak⁵⁷

Kebebasan pers dan profesionalisme merupakan kemajuan yang di tanamkan kepada wartawan AJI, diajarkan kepada wartawan agar tetap profesional walau kebutuhan hidup tak terpenuhi hahaha



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

⁵⁷ Nurdin Amir, Anggota AJI, *wawanvara*, Makassar, 28 Februari 2016

Dalam bab ini penulis akan menarik kesimpulan dari berbagai pembahasan yang terdahulu yaitu:

AJI sebagai salah satu Lembaga Jurnalis yang ada di Indonesia mempunyai peranan penting dalam membentuk karakter karakter seorang wartawan agar bisa menjadi wartawan yang profesional dan independen. Dengan mengadakan kajian atau berdiskusi yang mengkaji tentang pengalaman dan realitas yang terjadi di dunia kejournalistikan, begitupun dengan peningkatan sikap dan perilaku independen AJI menegaskan sebuah sanksi yang tidak segan-segan memberhentikan status keanggotaan bagi wartawan yang melanggar.

Standar upah layak ini ditetapkan AJI berdasarkan komponen dan harga kebutuhan hidup layak, dengan mengukur perubahan biaya hidup seiring kenaikan harga barang di pasar, yaitu : di Makassar Rp 4.037.226 namun masih banyak media yang cukup realistis dalam menanggapi hal tersebut.

Kemudian kesejahteraan wartawan tergantung dari perusahaan media tempat wartawan tersebut bekerja. AJI melakukan penguatan kompetensi, termasuk melakukan sertifikasi wartawan sehingga syarat minimal untuk meningkatkan kesejahteraan wartawan terpenuhi. Kualitas, langkah linear dan kuantitas harus dimiliki wartawan. Dalam artian wartawan yang memiliki kualitas yang lebih baik maka akan mendapatkan nilai jual yang lebih baik

pula. Wartawan yang profesional cenderung mendapatkan upah yang lebih dibandingkan wartawan tidak profesional. Wartawan yang tidak produktif secara psikologi akan dinilai oleh perusahaan media bahwa wartawan tersebut belum profesional. Wartawan yang belum profesional dapat mempengaruhi upah yang diberikan oleh perusahaan media.

Hambatan media pada umumnya perusahaan media berprinsip dengan modal sedikit untuk memperoleh keuntungan (Prinsip Kapitalisme). Tapi perusahaan media yang profesional memang takut memberikan non UMP, karena mereka tahu ada ancaman hukum yang bisa mereka dapatkan. Tapi perusahaan media yang besar relatif aman dalam penggajian. AJI menurut gaji wartawan sesuai standar UMP itu relatif lebih rendah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa AJI adalah organisasi yang menjunjung tinggi sikap profesional dan independen yang dapat menunjang kesejahteraan bagi wartawan yang bergelut didalamnya.

9. Implikasi Penelitian

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka adapun saran yang bisa disampaikan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) diharapkan lebih memaksimalkan sikap profesionalisme dan independensi wartawan yang ada di AJI, dan

pemerataan upah untuk semua wartawan baik itu cetak, elektronik maupun online agar dapat menyeimbangkan kesejahteraan wartawan.

2. Saran untuk pembaca khususnya mahasiswa UIN Alauddin Makassar, hendaknya karya tulis ini tidak menjadi sebagai satu-satunya acuan, tetapi bisa dilengkapi dan bahkan dibandingkan dengan karya tulis lainnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Aan Pranata, Anggota AJI, *Wawancara* Makassar 28 Februari 2016
- Atmakusumah dkk.. *Menggugat Praktek Amplop Wartawan Indonesia*. Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen. 2003
- Arep, Ishak dan Hendri Tanjungx. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti. 2003
- Asmaradhana, Upi. *Pengkhianatan Jurnalis*. Jakarta: ISAI. 2008
- Assegaf, Dja'far..*Jurnalistik Pengkhianatan Jurnalis Masa Kini*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1991
- Amir Nurdin, Anggota AJI, *wawanvara*, Makassar, 28 Februari 2016
- Bogdan, Robert dan Steven J.Taylor. *Pengantar Metoda Penelitian Kualitatif*. Surabaya: Usaha Nasional. 1992.
- Broder, David S. *Berita di Balik Berita*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 1992.
- Byrne, dkk.. *Social Psychology*. Boston: Pearson Education. 2006
- Cangara, Hafied. *Pengantar Ilmu Komunikasi (edisi revisi)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2007.
- Eriyanto. *Potret Jurnalis Indonesia*. Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen. 2006.
- Harsono, Andreas. *'Agama' Saya Adalah Jurnalisme*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius 2010.
- Hasibuan, Malayu. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Bumi Aksara. Universitas Sumatera Utara 2000.
- Junaedhi, Kurniawan.. *Ensiklopedia Pers Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 1991
- Kovach, Bill dan Tom Rosenstiel. *Sembilan Elemen Jurnalisme*. Jakarta: Yayasan Pantau. 2001.
- Kriyantono. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Kusumaningrat, Hikmat dan Purnama Kusumaningrat. *Jurnalistik Teori dan Praktik*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Liliweri, Alo. *Komunikasi Antar Pribadi*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 1991
- Mangkunegara, A A Anwar Prabu. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2001.
- Mulyana, Deddy. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2002
- Marzuki Ridwan, Sekjen AJI, *Wawancara* Makassar 28 Februari 2016
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: UGM Press. 1995.
- Nurudin.. *Jurnalisme Masa Kini*. Jakarta: Rajawali Pers. 2009
- Oetama, Jakob. *Perspektif Pers Indonesia*. Jakarta: LP3ES. 1987.

- Oetama, Jakob. *Pers Indonesia: berkomunikasi dalam masyarakat tidak tulus*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas. 2001.
- Panuju, Redi. *Nalar Jurnalistik*. Malang: Bayumedia Publishing. 2005.
- Purba, Amir dkk . *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Medan: PUSTAKA BANGSA PRESS.
- Pranata Aan, Anggota AJI, *Wawancara* Makassar 28 Februari 2016
- Rakhmat, Jalaluddin. *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Singarimbun, Masri dan Sofyan Effendy. 1995. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES. 2004.
- Sukardi, Wina Armada. *Menakar Kesejahteraan Wartawan*. Jakarta: DEWAN PERS. 2009.
- Umar supyan, Anggota AJI, *Wawancara*, Makassar 28 Februari 2016
- Walgito, Bimo. *Psikologi Sosial*. Yogyakarta: ANDI. 2003.

